



RENCANA KERJA TAHUN 2026

DINAS SOSIAL KAB. JOMBANG

Jalan Raden Wijaya No. 5 Jombang





PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS SOSIAL

Jl. Raden Wijaya No. 15 Jombang 61411
Telp. (0321) 8493687, Fax. -, e-mail: dinsos@jombangkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG
NOMOR: 100.3.7/528/415.20/2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026
DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 263 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan untuk menjamin keterpaduan Pembangunan tahunan, perlu disusun Rencana kerja Perangkat Daerah (Renja) PD;
- b. Bahwa Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun 2025 telah disusun berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2025-2029
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan dokumen Rencana Kerja tersebut dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 18
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419)
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jombang;
11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan Masyarakat dengan Kondisi Tertentu di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 1/E)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun Anggaran 2026
- KEDUA : Perubahan Renja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dijadikan dasar pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial pada Perubahan Anggaran Kegiatan Tahun 2026
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 12 Agustus 2025



KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN JOMBANG

HARI PURNOMO, AP, M.E

KATA PENGANTAR

Teriring puji syukur kehadiran Allah SWT dan atas segala rahmat dan hidayah-Nya Dinas Sosial Kabupaten Jombang telah menyusun rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, yang didalamnya memuat gambaran kinerja tahun sebelumnya serta program dan kegiatan yang disusun dalam upaya mewujudkan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Jombang tahun 2025-2029

Semua kebijakan rencana kerja tersebut berorientasi dalam satu kesatuan kerangka tujuan yaitu mewujudkan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan prima, melalui terbentuknya organisasi dan sistem kelembagaan daerah yang efisien dan efektif sesuai kebutuhan daerah, sesuai peraturan yang berlaku, didukung kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah yang semakin profesional agar mampu menyelenggarakan ketatalaksanaan pemerintahan yang makin berkualitas untuk menjawab dinamika proses pembangunan daerah yang responsif, transparan dan akuntabel.

Jombang, 12 Agustus 2025

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN JOMBANG**



HARI PURNOMO, AP, M.E

Pembina Utama Muda

NIP. 19751110 199501 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.3.1 Maksud	6
1.3.2 Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.....	15
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	32
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Jombang.....	54
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	64
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	80
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	90
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	99
3.3. Program dan Kegiatan	100
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 128
BAB V PENUTUP.....	146

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 :	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sampai dengan Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029.....	16
Tabel 2.2 :	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sampai dengan Tribulan I Tahun 2025	33
Tabel 2.2.1:	Pencapaian SPM bidang sosial sampai dengan Tribulan I tahun 2025.....	47
Tabel 2.3 :	Review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Sosial Tahun 2026	63
Tabel 2.5 :	Usulan Perubahan Program Dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun 2026.....	80
Tabel 3.1 :	Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Sosial Kabupaten Jombang.....	105
Tabel 4.1 :	Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial tahun 2025.....	129

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana kerja (renja) Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun 2026 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan, prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial dalam mendukung Pembangunan daerah di bidang urusan sosial. Dokumen ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial serta selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang tahun 2026.

Penyusunan renja tahun 2026 memiliki makna strategis karena merupakan tahun awal pelaksanaan kebijakan pemerintahan baru hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jombang yang baru membawa visi Pembangunan daerah “Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua”.

Visi tersebut dijabarkan dalam misi 2 yang diampu oleh Dinas Sosial, yakni Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur, religius dan berdaya saing global, sehingga mampu mendukung proses transformasi sosial yang inklusif, adaptif, dan inovatif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, Dinas Sosial memiliki peran penting dalam mencapai visi, misi tersebut, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin, rentan dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), melalui penyediaan layanan perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial serta penanganan bencana.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4823)
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

8. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987))
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6633)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927)
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Geder untuk Pemerintah Daerah)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/kota
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatura Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesiaa Tahun 2019 Nomor 1447)
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

23. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 100 SERI E)
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarustamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 96)
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 14/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jomang Tahun 2016 Nomor 14/E)
31. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender
32. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

Jombang Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 10/E);

33. Peraturan Bupati Jombang Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 55/E)
34. Peraturan Bupati Jombang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/E)
35. Peraturan Bupati Jombang Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 87/D)
36. Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan Kondisi Tertentu di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 1/E)

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan rencana kerja (renja) Dinas Sosial Kabupaten Jombang tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman tahunan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial, yang memuat prioritas, sasaran, indikator kinerja, target, serta rencana pendanaan, sehingga menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai arah kebijakan RPJMD 2025-2029 dan Renstra Dinas Sosial.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun 2026 adalah untuk :

1. Untuk merumuskan program dan kegiatan bidang sosial yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Jombang selama tahun 2026
2. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran
3. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Nasional.
4. Menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam perencanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan permendagri nomor 86 tahun 2017, penyajian Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi, serta tindak lanjutnya penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Tribulan II Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai Tribulan II (n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n+1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008. Jenis Indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan PD yang bersangkutan.

2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Pada sub bab ini berisikan uraian mengenai penyelenggaraan tupoksi perangkat daerah sesuai dengan Perda dan Perbup :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDG's (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam sub bab ini berisikan uraian mengenai dukungan PD sesuai proses bisnis dalam mendukung sasaran daerah yang ada di Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
3. Penjelasan penemuan-penemuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besaran berbeda

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh, yakni melalui usulan pemangku

kepentingan dalam usulan prioritas kecamatan dan, usulam melalui forum renja Perangkat Daerah

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, diantaranya terkait dengan :
 - a. Pencapaian tujuan dan sasaran daerah
 - b. Pencapaian SDGs
 - c. Pertumbuhan ekonomi
 - d. Penurunan tingkat pengangguran terbuka
 - e. Peningkatan indeks Pembangunan manusia (IPM)
 - f. Pengentasan kemiskinan
 - g. Penurunan stunting

- h. Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender (KKB)
- i. Pencapaian NSPK dan SPM
- j. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
- k. Pemerataan Pembangunan
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - 1. Jumlah program dan jumlah kegiatan;
 - 2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu)
 - 3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya
- c. Penjelasan jikar rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan tabel

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama perangkat daerah dan nama dan tangan tangan Kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintahan daerah yang bersangkutan

BAB II **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD

Secara umum pada tahun 2025, Dinas Sosial melaksanakan satu urusan yaitu urusan wajib pelayanan dasar bidang sosial dengan menyelenggarakan 6 (enam) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 52 (lima puluh dua) sub kegiatan.

Dinas Sosial pada tahun 2025 mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp. 25.172.214.207 dan terealisasi sebesar Rp. 3.636.066.814 atau 14,44%

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 pada Dinas Sosial Kabupaten Jombang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Tribulan I Tahun 2025
Dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial Tahun 2024-2026 Kabupaten Jombang

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra pada Tahun 2024-2026 (Periode Renstra) (2026)		Realisasi capaian kinerja PD s/d renja PD tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sd triwulan I (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d 2025 (%)	
Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	persen	100	16.466.999.780	100	3.827.813.297	100	5.153.804.697	98	1.929.742.151	98	37,44	198	5.757.555.448	100	100
Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	persen	100	50.166.000	100	4.970.000	100	10.612.500	42,8	4.063.010	42,8	38,29	142,8	1.934.712.151	100	100
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	dokumen	7	9.444.000			3	6.622.500	0	2.794.760	0	42,2	0	1.929.742.151	0	100
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	12	40.722.000			4	3.990.000	2	1.268.250	50	31,8	50	1.268.250	2	100
Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Persen	100	10.842.582.240	100	2.909.173.512	100	3.287.310.283.827.813.2972	57,1	1.235.598.022	57,1	37,6	157,1	4.838.915.663	100	100
	Persentase laporan keuangan	Persen	3				100		100		100		100			

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra pada Tahun 2024-2026 (Periode Renstra) (2026)		Realisasi capaian kinerja PD s/d renja PD tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sd triwulan I (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d 2025 (%)	
	yang tersusun sesuai aturan															
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	19	10.320.315.840			19	3.104.250.882	18	1.196.004.522	94,7	38,5	18	1.196.004.522	100	100
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaa dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	36	519.282.000			12	182.064.000	6	38.946.000	50	21,4	6	38.946.000	100	100
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen	3	1.184.400			1	395.500	1	395.000	100	99,9	1	395.000	100	100
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ tribulanan/semester SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ tribulanan/ semester SKPD yang disusun	laporan	51	1.800.000			17	599.900	8	252.500	47,1	42,1	8	252.500	100	100
Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian	persen	100	12.600.000	0	0	100	11.400.000	0	0	0	0	0	0	0	100
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	paket	57	12.600.000			19	11.400.000	0	0	0	0	0	0	0	100
Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	persentase pelayanan yang	Persen	100	869.834.100	100	290.131.700	100	245.742.100	50	100.752.918	50	41	150	2.109.933.584	100	100

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra pada Tahun 2024-2026 (Periode Renstra) (2026)		Realisasi capaian kinerja PD s/d renja PD tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sd triwulan I (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d 2025 (%)	
	difasilitasi															
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan"	Paket	24	17.952.000			1	5.602.100	1	5.602.100	100	100	1	5.602.100	1	100
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	30	52.141.500			1	17.380.200	1	10.516.600	100	60,5	1	10.516.600	1	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang Disediakan	paket	15	9.000.000			1	3.097.800	1	2.840.000	100	91,6 8	1	2.840.000	1	100
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	6	612.534.000			4	155.400.000	4	44.099.264	100	28,3 8	4	44.099.264	4	100
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	15	28.404.900			1	7.025.000	1	4.505.000	100	64,1 3	1	4.505.000	1	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Paket	36	17.123.700			12	5.556.000	6	1.720.000	50	30,9 6	6	1.720.000	6	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	paket	36	132.678.000			12	51.681.000	6	31.469.954	50	60,8 9	6	31.469.954	6	100

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra pada Tahun 2024-2026 (Periode Renstra) (2026)		Realisasi capaian kinerja PD s/d renja PD tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sd triwulan I (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d 2025 (%)	
Kegiatan : pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	persen	100		100	18.790.000	100	703.802.800	52,6	215.211.161	52,6	30,58	52,6	215.211.161	52,6	100
Pengadaan mebel	Jumlah mebel yang disediakan	unit					11	26317800	11	25.630.000	100	97,39	11	25.630.000	11	100
Pengadaan kendaraan dinas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	436.764.000												
Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	1.547.541.400			1	435.700.000	0	38.911.161	0	8,93	0	38.911.161	0	100
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	33	431.761.800			38	241.785.000	20	150.670.000	52,63	62,32	20	150.670.000	20	100
Kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	1.484.725.600	100	490.259.776	100	534.282.660	50	223.677.040	50	39,53	150	223.677.040	100	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	379.800.000			12	127.800.000	6	50.522.549	50	42,6	6	50.522.549	6	100

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra pada Tahun 2024-2026 (Periode Renstra) (2026)		Realisasi capaian kinerja PD s/d renja PD tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sd triwulan I (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d 2025 (%)	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	1.104.925.600			12	406.482.660	6	173.154.491	50	42,6	6	173.154.491	6	100
Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	persen	100	758.096.840	100	256.716.040	100	360.654.355	50	150.440.000	50	41,71	50	150.440.000	100	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	125.891.000			1	40.610.000	1	15.450.000	100	38,04	1	15.450.000	1	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	36	228.076.200			37	186.556.696	19	13.120.000	51,35	7,03	19	13.120.000	19	100
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya Dinas Sosial yang dipelihara	Unit	6	343.227.000			2	114.407.659	2	114.000.000	100	99,64	2	114.000.000	2	100
Pemeliharaan-Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	unit	57	60.902.640			16	19.080.000	11	7.870.000	68,75	41,25	11	7.870.000	11	100

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra pada Tahun 2024-2026 (Periode Renstra) (2026)		Realisasi capaian kinerja PD s/d renja PD tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sd triwulan I (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d 2025 (%)	
Program pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesos tersertifikasi	persen	37,4	5.189.673.700			7	1.332.336.150	21	200.033.800	100	15,1	29	200.033.800	100	49,97
	LKS terakreditasi	persen	8,1				33,3		41		100	41				
Kegiatan pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/ kota	Persentase pemerlu yang diberikan rekomendasi pengumpulan sumbangan atau undian gratis berhadiah	persen	100	46.317.100	70	8.477.100	70	13.397.500	30	10.422.250	42,8 6	77,7 9	100	10.422.250	100	100
Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	dokumen	45	46.317.100			10	13.397.500	3	10.422.250	30	77,7 9	3	10.422.250	3	100
Kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial mendapatkan peningkatan SDM	persen	91,3	5.143.356.600	43	1.832.432.157	82,9	1.318.938.650	30,5	189.611.550	36,7 9	14,3 8	73,5	189.611.550	80,7 7	100
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten-Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	900	1.092.300.000			315	271.873.000	40	14.766.000	12,7	5,43	40	14.766.000	43,9 6	100

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra pada Tahun 2024-2026 (Periode Renstra) (2026)		Realisasi capaian kinerja PD s/d renja PD tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sd triwulan I (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d 2025 (%)	
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten-Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	21	420.211.400			21	100.276.600	21	38.084.100	100	37,98	21	38.084.100	23,08	100
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten-Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	keluarga	540	174.796.300			80	40.490.000	80	17.600.000	100	43,47	80	17.600.000	87,91	100
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten-Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	lembaga	87	3.385.063.900			87	888.092.000	42	105.469.500	42,28	11,88	42	105.469.500	46,15	100
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	sertifikat	105	70.985.000			25	18.207.050	25	13.691.950	100	75,2	25	13.691.950	27,27	100
Program rehabilitasi sosial	Persentase disabilitas terlantar, anak	Persen	44,8	6.193.635.200	6	1.351.539.700	100	1.712.324.350	48	635.546.016	48	37,12	54	635.546.016	100	42,06

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra pada Tahun 2024-2026 (Periode Renstra) (2026)		Realisasi capaian kinerja PD s/d renja PD tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sd triwulan I (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d 2025 (%)	
	terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis di luar panti sosial yang berhasil direhabilitasi															
	Persentase PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang berhasil direhabilitasi	persen	100				4,3		4		93,0 2	4				
Kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	persen	100	5.207.668.300	100	1.317.003.000	100	1.512.226.950	62,3	552.028.403	62,3	36,5	162,3	552.028.403	100	100
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	1395	3.810.081.900			715	1.053.350.000	606	324.250.000	84,7 6	30,7 8	606	324.250.000	100	100

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra pada Tahun 2024-2026 (Periode Renstra) (2026)		Realisasi capaian kinerja PD s/d renja PD tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sd triwulan I (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d 2025 (%)	
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	orang	360	48.789.400			120	40.858.300	120	40.771.800	100	99,79	120	40.771.800	100	100
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	37	72.820.000			74	105.000.000	0	73.680.000	0	70,17	0	73.680.000	0	100
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	285	546.150.000			200	137.380.000	24	62.901.155	12	45,79	24100	62.901.155	24	100
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	orang	810	439.707.700			255	130.350.000	100	43.452.500	39,22	33,34	100	43.452.500	100	100
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut	orang	210	126.274.300			60	27.903.650	0	0	0	0	0	0	0	100

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra pada Tahun 2024-2026 (Periode Renstra) (2026)		Realisasi capaian kinerja PD s/d renja PD tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sd triwulan I (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d 2025 (%)	
	Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota															
Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	147	163.845.000			42	17.385.000	32	6.972.948	76,19	40,11	32	6.972.948	31	100
Kegiatan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan napza di luar panti sosial	Persentase PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang direhabilitasi	persen	100	985.966.900	98	34.536.700	100	200.097.400	48,9	83.517.613	48,9	41,74	146,9	83.517.613	100	100
Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	180	45.512.500			60	17.274.000	60	17.118.000	100	99,1	60	17.118.000	60	100
Penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	180	54.000.000			70	24.500.000	70	24.500.000	10	100	70	24.500.000	70	100

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra pada Tahun 2024-2026 (Periode Renstra) (2026)		Realisasi capaian kinerja PD s/d renja PD tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sd triwulan I (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d 2025 (%)	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	orang	1425	736.180.400			80	29.587.250	80	29.587.250	26,23	24,05	80	29.587.250	80	100
Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	150	66.200.000			40	12.625.000	64	1.975.000	100	15,64	64	1.975.000	64	100
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	orang	150	84.074.000			40	22.700.000	17	10.337.363	42,5	45,54	17	10.337.363	17	100
Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang mendapatkan perlindungan sosial	Persen	24,1	15.089.842.900	60	14.739.579.675	61	15.802.093.873	94	931.133.584	100	5,89	174	931.133.584	100	47,2
	Persentase data terpadu kesejahteraan sosial yang valid	Persen	79,5				78,6		82		100	82				
	Persentase mayarakat miskin dan rentan yang mendapatkan	persen	66,5				23,9		23		96,23	23				

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra pada Tahun 2024-2026 (Periode Renstra) (2026)		Realisasi capaian kinerja PD s/d renja PD tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sd triwulan I (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d 2025 (%)	
	jaminan sosial															
Kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/ kota	Persentase desa/jkelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran DTKS	Persen	100	15.089.842.900	100	14.739.579.675	60,9	15802093873	8,2	931.133.584	13,46	5,89	108,2	931.133.584	100	100
	Persentase keluarga miskin dan rentan dalam DTKS yang menerima bantuan sosial	persen	62,5				100		53,9							
	Persentase penerima bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	persen	100				100		0							
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten-Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	728770	1.057.037.300			728770	277.648.850	687674	181.161.584	94,25	65,25	687674	181.161.584	100	100
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten-Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	662028	64.422.300			662028	22.584.500	623772	3.000.000	94,22	13,28	623772	3.000.000	100	100
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan	Keluarga	38400	10.248.118.700			16703	14.999.751.338	3340	650.972.000	20	4,34	3340	650.972.000	100	100

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra pada Tahun 2024-2026 (Periode Renstra) (2026)		Realisasi capaian kinerja PD s/d renja PD tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sd triwulan I (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d 2025 (%)	
	Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota															
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	orang	2100	3.720.264.600			160	502.109.185	0	96.000.000	0	19,2	0	96.000.000	0	100
Program penanganan bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	Persen	100	1.417.985.900	100	189.150.600	100	624.363.600	100	268.573.000	100	43,02	200	268.573.000	100	44,4
	Persentase desa siaga bencana yang aktif	persen	16,3				10,5		0		0	0	0			
Kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/ kota	persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial	persen	100	1.220.969.300	100	120.540.000	100		100		100	50,52	200			
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	1.082.611.300			7850	414.999.100	3626	210.169.000	46,19	50,64	3626	210.169.000	100	100
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang	Orang	100	36.410.000			200	36.000.000	18	35.700.000	9	99,17	18	35.700.000	18	100

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra pada Tahun 2024-2026 (Periode Renstra) (2026)		Realisasi capaian kinerja PD s/d renja PD tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sd triwulan I (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d 2025 (%)	
	Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota															
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	unit	3	36.410.000			1	9.350.000	1		100	0	1		1	100
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	330	36.410.000			200	16.540.000	25	0	12,5	0	25	0	25	100
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	330	29.128.000			100	9.835.000	21	0	21	0	21	0	21	100
Kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/ kota	Persentase desa siaga bencana yang aktif	Persen	16,3	197.016.600			10,5	137.639.500	0	22.704.000				22.704.000		
	Persentase Taruna Siaga Bencana (tagana) yang aktif	persen	100						0							
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi,	Kampung	121	36.410.000			15	32.829.500	0	0	0	0	0	0		

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra pada Tahun 2024-2026 (Periode Renstra) (2026)		Realisasi capaian kinerja PD s/d renja PD tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sd triwulan I (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d 2025 (%)	
	Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota															
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	36	160.606.600			36	104.810.000	40	22.704.000	100	21,66	40	22.704.000	100	100
Program pengelolaan taman makam pahlawan	Persentase sarana prasarana taman makam pahlawan nasional yang terkelola sesuai standar	persen	95	739.887.600			85	114.904.000	95	101.789.500	100	88,59	180	101.789.500	100	100
Kegiatan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/ kota	Persentase sarana prasarana taman makam pahlawan nasional dalam kondisi baik	persen	95	739.887.600			85	114.904.000	95		100	88,59	180			
Rehabilitasi sarana dan prasarana Taman Makam pahlawan Nasional Kabupaten/ kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	dokumen	1	691.790.000			1	100.380.000	1	100.000.000	100	99,62	1	100.000.000		

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra pada Tahun 2024-2026 (Periode Renstra) (2026)		Realisasi capaian kinerja PD s/d renja PD tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sd triwulan I (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d 2025 (%)	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten-Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	makam	1	48.097.600			1	14.524.000	1	1.789.500	100	12,32	1	1.789.500	1,05	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Efektivitas adalah tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas pencapaian sasaran diartikan sebagai tercapainya sasaran (100% atau lebih) sesuai target yang telah ditetapkan berdasarkan capaian kinerja sasaran. Berdasarkan laporan capaian indikator kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2025 menunjukkan adanya program dan kegiatan yang belum efektif atau belum terealisasi sesuai dengan rencana meski capaian kinerja telah menunjukkan hasil yang memuaskan.

Adapun tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupten Jombang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sampai Dengan Tribulan I Tahun 2025
Dinas Sosial Kabupaten Jombang

No	Indikator	SPM/ NSPK/ SDGs	IKK	target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	
1.06.01	Nilai evaluasi AKIP perangkat daeah			n/a	78,65 nilai	78,55 nilai	78,65 nilai	n/a	78,65 nilai	78,65 nilai	78,65 nilai	
1.06.01.2.01	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	1 laporan	4 laporan	4 laporan	
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			n/a	107 Data	107 Data	107 Data	n/a	0 Data	107 Data	107 Data	
1.06.01.2.01.0001	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	
1.06.01.2.01.0006	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	1 laporan	4 laporan	4 laporan	

No	Indikator	SPM/ NSPK/ SDGs	IKK	target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	
1.06.01.2.01.0009	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			n/a	107 Data	107 Data	107 Data	n/a	0 Data	107 Data	107 Data	
1.06.01.2.02	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			18 orang/ bulan	20 orang/ bulan	20 orang/ bulan	20 orang/ bulan	18 orang/ bulan	20 orang/ bulan	20 orang/ bulan	20 orang/ bulan	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	3 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
	Jumlah laporan keuangan bulanan/tribulanan/ semester SKPD yang disusun			17 laporan	17 laporan	17 laporan	17 laporan	17 laporan	4 laporan	17 laporan	17 laporan	
1.06.01.2.02.0001	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			18 orang/ bulan	20 orang/ bulan	20 orang/ bulan	18 orang/ bulan	19 orang/ bulan	20 orang/ bulan	20 orang/ bulan	20 orang/ bulan	
1.06.01.2.02.0003	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	3 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	
1.06.01.2.02.0005	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	

No	Indikator	SPM/ NSPK/ SDGs	IKK	target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	
1.06.01.2.02.0007	Jumlah laporan keuangan bulanan/tribulanan/ semester SKPD yang disusun			17 laporan	17 laporan	17 laporan	17 laporan	17 laporan	4 laporan	17 laporan	17 laporan	
1.06.01.2.05	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan			18 paket	0 paket	20 paket	20 paket	18 paket	0 paket	20 paket	20 paket	
1.06.01.2.05.0002	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan			18 paket	0 paket	20 paket	20 paket	18 paket	0 paket	20 paket	20 paket	
1.06.01.2.06	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	
	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	
	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan			5 paket	5 paket	1 paket	5 paket	5 paket	5 paket	1 paket	5 paket	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	3 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	3 dokumen	12 laporan	12 laporan	

No	Indikator	SPM/ NSPK/ SDGs	IKK	target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	
1.06.01.2.06.0001	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	
1.06.01.2.06.0002	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	
1.06.01.2.06.0003	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan			5 paket	5 paket	1 paket	5 paket	5 paket	5 paket	1 paket	5 paket	
1.06.01.2.06.0004	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	
1.06.01.2.06.0005	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	
1.06.01.2.06.0006	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	3 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	
1.06.01.2.06.0009	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	3 dokumen	12 laporan	12 laporan	
1.06.01.2.07	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung atau bangunan lainnya			12 unit	12 unit	8 unit	12 unit	12 unit	12 unit	8 unit	12 unit	
1.06.01.2.07.0010	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung atau bangunan lainnya			12 unit	12 unit	8 unit	12 unit	12 unit	5 unit	8 unit	12 unit	

No	Indikator	SPM/ NSPK/ SDGs	IKK	target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	
1.06.01.2.08	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	3 dokumen	12 laporan	12 laporan	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	3 dokumen	12 laporan	12 laporan	
1.06.01.2.08.0002	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	3 dokumen	12 laporan	12 laporan	
1.06.01.2.08.0004	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	3 dokumen	12 laporan	12 laporan	
1.06.01.2.09	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			36 unit	36 unit	36 unit	36 unit	36 unit	17 unit	36 unit	36 unit	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			38 unit	38 unit	38 unit	38 unit	38 unit	9 unit	38 unit	38 unit	

No	Indikator	SPM/ NSPK/ SDGs	IKK	target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	
1.06.01.2.09.0001	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	
1.06.01.2.09.0002	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			36 unit	36 unit	36 unit	36 unit	36 unit	17 unit	36 unit	36 unit	
1.06.01.2.09.0009	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	
1.06.01.2.09.0010	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			38 unit	38 unit	38 unit	38 unit	38 unit	9 unit	38 unit	38 unit	
1.06.02	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berdaya			n/a	100,00%	100,00%	100,00%	n/a	100,00%	100,00%	100,00%	
1.06.02.2.02	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang			10 dokumen	15 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	10 dokumen	4 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	
1.06.02.2.02.0001	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang			10 dokumen	15 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	10 dokumen	4 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	

No	Indikator	SPM/ NSPK/ SDGs	IKK	target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	
1.06.02.2.03	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			30 keluarga	80 keluarga	80 keluarga	80 keluarga	40 keluarga	0 keluarga	80 keluarga	80 keluarga	
	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			28 lembaga	87 lembaga	87 lembaga	87 lembaga	28 lembaga	74 lembaga	87 lembaga	87 lembaga	
	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial			n/a	230 orang	221 orang	230 orang	n/a	0 orang	221 orang	221 orang	
	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial			n/a	375 orang	375 orang	375 orang	n/a	0 orang	375 orang	375 orang	
	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota			20 orang	30 orang	35 orang	37 orang	20 orang	0 orang	35 orang	37 orang	

No	Indikator	SPM/ NSPK/ SDGs	IKK	target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	
	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi			n/a	306 desa/kelurahan	306 desa/kelurahan	306 desa/kelurahan	n/a	0 orang	306 desa/kelurahan	306 desa/kelurahan	
	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya			n/a	75 orang	70 orang	75 orang	n/a	0 orang	75 orang	75 orang	
1.06.02.2.03.0003	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			30 keluarga	80 keluarga	80 keluarga	80 keluarga	40 keluarga	0 keluarga	80 keluarga	80 keluarga	
1.06.02.2.03.0004	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			28 lembaga	87 lembaga	87 lembaga	87 lembaga	28 lembaga	74 lembaga	87 lembaga	87 lembaga	
1.06.02.2.03.0010	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial			n/a	230 orang	221 orang	230 orang	n/a	0 orang	221 orang	221 orang	

No	Indikator	SPM/ NSPK/ SDGs	IKK	target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	
1.06.02.2.03.0011	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial			n/a	375 orang	375 orang	375 orang	n/a	0 orang	375 orang	375 orang	
1.06.02.2.03.0012	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota			20 orang	30 orang	35 orang	37 orang	20 orang	0 orang	35 orang	37 orang	
1.06.02.2.03.0013	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi			n/a	306 desa/ kelurahan	306 desa/ kelurahan	306 desa/ kelurahan	n/a	0 orang	306 desa/ kelurahan	306 desa/ kelurahan	
1.06.02.2.03.0014	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya			n/a	75 orang	70 orang	75 orang	n/a	0 orang	75 orang	75 orang	
1.06.04	Persentase penerima manfaat yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial			1,60%	1,60%	1,50%	1,60%	n/a	1,60%	1,60%	1,60%	

No	Indikator	SPM/ NSPK/ SDGs	IKK	target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	
1.06.04.2.01	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			333 orang	443 orang	465 orang	470 orang	333 orang	0 orang	470 orang	470 orang	
	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota			50 orang	120 orang	125 orang	130 orang	50 orang	0 orang	130 orang	130 orang	
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota			16 orang	12 orang	50 orang	55 orang	16 orang	0 orang	55 orang	55 orang	
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			52 orang	95 orang	100 orang	100 orang	90 orang	23 orang	100 orang	100 orang	
	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota			100 orang	270 orang	130 orang	130 orang	100 orang	70 orang	130 orang	130 orang	
	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			0 orang	70 orang	70 orang	75 orang	60 orang	0 orang	60 orang	75 orang	

No	Indikator	SPM/ NSPK/ SDGs	IKK	target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota			n/a	25 orang	25 orang	25 orang	n/a	0 orang	25 orang	25 orang	
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota			n/a	100 orang	100 orang	100 orang	n/a	0 orang	100 orang	100 orang	
	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/Kota			n/a	50 orang	50 orang	50 orang	n/a	14 orang	50 orang	50 orang	
	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota			n/a	50 orang	50 orang	50 orang	n/a	0 orang	50 orang	50 orang	
	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi			n/a	10 orang		10 orang	n/a	0 orang	10 orang	10 orang	
	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota			n/a	20 orang	20 orang	20 orang	n/a	0 orang	20 orang	20 orang	

No	Indikator	SPM/ NSPK/ SDGs	IKK	target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota			n/a	70 orang	70 orang	70 orang	n/a	0 orang	70 orang	70 orang	
	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial			n/a	10 orang	10 orang	10 orang	n/a	0 orang	10 orang	10 orang	
1.06.04.2.01.0001	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			333 orang	443 orang	465 orang	470 orang	333 orang	0 orang	470 orang	470 orang	
1.06.04.2.01.0002	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota			50 orang	120 orang	125 orang	130 orang	50 orang	0 orang	130 orang	130 orang	
1.06.04.2.01.0003	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota			16 orang	12 orang	50 orang	55 orang	16 orang	0 orang	55 orang	55 orang	
1.06.04.2.01.0004	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			52 orang	95 orang	100 orang	100 orang	90 orang	23 orang	100 orang	100 orang	
1.06.04.2.01.0005	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota			100 orang	270 orang	130 orang	130 orang	100 orang	70 orang	130 orang	130 orang	

No	Indikator	SPM/ NSPK/ SDGs	IKK	target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	
1.06.04.2.01.0006	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			0 orang	70 orang	70 orang	75 orang	60 orang	0 orang	75 orang	75 orang	
1.06.04.2.01.0008	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota			n/a	25 orang	25 orang	25 orang	n/a	0 orang	25 orang	25 orang	
1.06.04.2.01.0010	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota			n/a	100 orang	100 orang	100 orang	n/a	0 orang	100 orang	100 orang	
1.06.04.2.01.0011	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/Kota			n/a	50 orang	50 orang	50 orang	n/a	14 orang	50 orang	50 orang	
1.06.04.2.01.0012	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota			n/a	50 orang	50 orang	50 orang	n/a	0 orang	50 orang	50 orang	
1.06.04.2.01.0015	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi			n/a	10 orang		10 orang	n/a	0 orang	10 orang	10 orang	

No	Indikator	SPM/ NSPK/ SDGs	IKK	target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	
1.06.04.2.01.0016	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota			n/a	20 orang	20 orang	20 orang	n/a	0 orang	20 orang	20 orang	
1.06.04.2.01.0017	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota			n/a	70 orang	70 orang	70 orang	n/a	0 orang	70 orang	70 orang	
1.06.04.2.01.0018	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial			n/a	10 orang	10 orang	10 orang	n/a	0 orang	10 orang	10 orang	
1.06.04.2.02	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota			40 orang	70 orang	70 orang	70 orang	40 orang	70 orang	70 orang	70 orang	
	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan diluar panti kewenangan Kabupaten/Kota			n/a	70 orang	70 orang	75 orang	n/a	70 orang	75 orang	75 orang	
	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota			280 orang	475 orang	270 orang	280 orang	280 orang	50 orang	280 orang	280 orang	

No	Indikator	SPM/ NSPK/ SDGs	IKK	target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	
	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/Kota			n/a	55 orang	50 orang	55 orang	n/a	42 orang	55 orang	55 orang	
	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota			n/a	50 orang	50 orang	50 orang	n/a	17 orang	50 orang	50 orang	
	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota			n/a	n/a	50 orang	50 orang	n/a	n/a	50 orang	50 orang	
1.06.04.2.03.0004	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota			40 orang	70 orang	70 orang	70 orang	40 orang	70 orang	70 orang	70 orang	
1.06.04.2.02.0006	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan diluar panti kewenangan Kabupaten/Kota			n/a	70 orang	70 orang	75 orang	n/a	70 orang	75 orang	75 orang	
1.06.04.2.02.0007	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota			280 orang	475 orang	270 orang	280 orang	280 orang	50 orang	280 orang	280 orang	
1.06.04.2.02.0011	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/Kota			n/a	55 orang	50 orang	55 orang	n/a	42 orang	55 orang	55 orang	

No	Indikator	SPM/ NSPK/ SDGs	IKK	target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	
1.06.04.2.02.0012	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota			n/a	50 orang	50 orang	50 orang	n/a	17 orang	50 orang	50 orang	
1.06.04.2.02.0013	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota			n/a	n/a	50 orang	50 orang	n/a	n/a	50 orang	50 orang	
1.06.05	Persentase penerima bantuan sosial yang mendapatkan akses layanan dasar dan bantuan usaha			n/a	95,67 persen	95,67 persen	95,67 persen	n/a	95,67 persen	95,67 persen	95,67 persen	
1.06.05.2.02	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata			728.770 orang	685875 orang	105.544 orang	105.544 orang	728.770 orang	670092 orang	105.544 orang	105.544 orang	
	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			160 orang	140 orang	140 orang	140 orang	160 orang	0 orang	140 orang	140 orang	
	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			14.713 orang	17.270 orang	17.713 orang	17.713 orang	14.713 orang	3636 orang	17.713 orang	17.713 orang	
	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan			280341 orang	280341 orang	1705 usulan	1705 usulan	280341 orang	264123 orang	1705 usulan	1705 usulan	
1.06.05.2.02.0001	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata			728.770 orang	685875 orang	105.544 orang	105.544 orang	728.770 orang	670092 orang	105.544 orang	105.544 orang	

No	Indikator	SPM/ NSPK/ SDGs	IKK	target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	
1.06.05.2.02.0004	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			160 orang	140 orang	140 orang	140 orang	160 orang	0 orang	140 orang	140 orang	
1.06.05.2.02.0006	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			14.713 orang	17.270 orang	17.713 orang	17.713 orang	14.713 orang	3636 orang	17.713 orang	17.713 orang	
1.06.05.2.02.0008	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan			280341 orang	280341 orang	1705 usulan	1705 usulan	280341 orang	264123 orang	1705 usulan	1705 usulan	
1.06.06	Persentase kejadian bencana yang tertangani			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.06.06.2.01	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota			7850 orang	7900 orang	7900 orang	7900 orang	11.636 orang	5566 orang	7900 orang	7900 orang	
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			100 orang	100 orang	200 orang	200 orang	100 orang	100 orang	200 orang	200 orang	

No	Indikator	SPM/ NSPK/ SDGs	IKK	target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota			200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	
	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Kabupaten/Kota			200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	
	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota			1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	
1.06.06.2.01.0001	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota			7850 orang	7900 orang	7900 orang	7900 orang	11.636 orang	5566 orang	7900 orang	7900 orang	
1.06.06.2.01.0002	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			100 orang	100 orang	200 orang	200 orang	100 orang	100 orang	200 orang	200 orang	
1.06.06.2.01.0004	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota			200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	

No	Indikator	SPM/ NSPK/ SDGs	IKK	target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	
1.06.06.2.01.0005	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Kabupaten/Kota			200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	
1.06.06.2.01.0007	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota			1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	
1.06.06.2.02	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			32 kampung	40 kampung	50 kampung	50 kampung	50 kampung	0 kampung	50 kampung	50 kampung	
	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			36 orang	36 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	
	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana			n/a	n/a	300 orang	300 orang	n/a	n/a	300 orang	300 orang	
1.06.06.2.02.0001	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			32 kampung	40 kampung	50 kampung	50 kampung	50 kampung	0 kampung	50 kampung	50 kampung	
1.06.06.2.02.0002	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana			36 orang	36 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	

No	Indikator	SPM/ NSPK/ SDGs	IKK	target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	
	Kewenangan Kabupaten/Kota											
Sosialisasi dan Edukasi	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana			n/a	n/a	300 orang	300 orang	n/a	n/a	300 orang	300 orang	
1.06.07	Persentase taman makam pahlawan (TMP) yang sesuai standar			95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	
1.06.07.2.01	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota			1 makam	1 makam	1 makam	1 makam	1 makam	1 makam	1 makam	1 makam	
1.06.07.2.01.0001	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
1.06.07.2.01.0002	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota			1 makam	1 makam	1 makam	1 makam	1 makam	1 makam	1 makam	1 makam	

Tabel 2.2.1
Pencapaian SPM bidang Sosial Sampai Dengan Tribulan I Tahun 2025
Dinas Sosial Kabupaten Jombang

No		INDIKATOR KINERJA LAYANAN / JENIS LAYANAN SPM	TARGET SPM	REALIASI SPM	CAPAIAN (%)
1		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	348	37	10,63
	1	Layanan data dan pengaduan Layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Dinas Sosial dan/atau pusat kesejahteraan sosial	15	3	20
	2	Penyediaan permakanan (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan.atau pusat kesejahteraan sosial kepada anak terlantar)	105	0	0
	3	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (layanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas Sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	12	3	25
	4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita dan yang mengalami bedridden, pembeian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	30	0	0
	5	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna Netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	15	0	0
	6	Penyediaan perbekalan Kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, thermometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	25	25	100
	7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan Kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/ outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	50	0	0

No		INDIKATOR KINERJA LAYANAN / JENIS LAYANAN SPM	TARGET SPM	REALIASI SPM	CAPAIAN (%)
	8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta Masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di pusat kesejahteraan sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	70	0	0
	9	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan/bukti kepemilikan NIK	1	0	0
	10	Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar (fasilitasi layanan Pendidikan sekolah dan Kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	1	0	0
	11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	8	2	25
	12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan Kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendamping sehingga berada di lingkungan yang terlindung)	8	1	12,5
	13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	12	3	25
2		Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	336	48	14,29
	1	Layanan data dan pengaduan Layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Dinas Sosial dan/atau pusat kesejahteraan sosial	48	0	0
	2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (layanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas Sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permukiman/orang/hari)	45	2	43
	3	Penyediaan permukiman (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan/atau pusat kesejahteraan sosial kepada anak terlantar)	125	0	0
	4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan)	30	0	0

No		INDIKATOR KINERJA LAYANAN / JENIS LAYANAN SPM	TARGET SPM	REALIASI SPM	CAPAIAN (%)
		dewasa, balita dan yang mengalami bedridden, pembeian alas kaki dan kebutuhan lainnya)			
	5	Penyediaan perbekalan Kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, thermometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	20	20	100
	6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan Kesehatan jasmani penerima pelayanan/ olahraga/ outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	42	42	0
	7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta Masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di pusat kesejahteraan sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	0	0	0
	8	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan/bukti kepemilikan NIK	6	0	0
	9	Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar (fasilitasi layanan Pendidikan sekolah dan Kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	8	0	0
	10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	62	0	0
	11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan Kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendamping sehingga berada di lingkungan yang terlindung)	26	4	15,38
	12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	7	2	28,57
3		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	432	27	6,25
	1	Layanan data dan pengaduan Layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Dinas Sosial dan/atau pusat kesejahteraan sosial	31	7	33,33

No		INDIKATOR KINERJA LAYANAN / JENIS LAYANAN SPM	TARGET SPM	REALIASI SPM	CAPAIAN (%)
	2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (layanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas Sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permukiman/orang/hari)	14	7	50
	3	Penyediaan permukiman (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan.atau pusat kesejahteraan sosial kepada anak terlantar)	210	0	0
	4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita dan yang mengalami bedridden, pembeian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	45	0	0
	5	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna Netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	14	0	0
	6	Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar (fasilitasi layanan Pendidikan sekolah dan Kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	20	20	100
	7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan Kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/ outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	50	0	0
	8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta Masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di pusat kesejahteraan sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	0	0	0
	9	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan/bukti kepemilikan NIK	1	0	0
	10	Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar (fasilitasi layanan Pendidikan sekolah dan Kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	3	2	66,67
	11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	19	6	31,58
	12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan Kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat	16	4	25

No		INDIKATOR KINERJA LAYANAN / JENIS LAYANAN SPM	TARGET SPM	REALIASI SPM	CAPAIAN (%)
		memberikan perawatan dan/atau pendamping sehingga berada di lingkungan yang terlindung)			
	13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	19	1	5,26
4		Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	177	44	24,86
	1	Layanan data dan pengaduan Layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Dinas Sosial dan/atau pusat kesejahteraan sosial	30	14	44,67
	2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (layanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas Sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permukiman/orang/hari)	32	14	43,75
	3	Penyediaan permukiman (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan/atau pusat kesejahteraan sosial kepada anak terlantar)	20	0	0
	4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita dan yang mengalami bedridden, pembeian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	15	0	0
	5	Penyediaan perbekalan Kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, thermometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	5	0	0
	6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan Kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/ outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	0	0	0
	7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta Masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di pusat kesejahteraan sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	0	0	0

No		INDIKATOR KINERJA LAYANAN / JENIS LAYANAN SPM	TARGET SPM	REALIASI SPM	CAPAIAN (%)
	8	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan/bukti kepemilikan NIK	1	0	0
	9	Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar (fasilitasi layanan Pendidikan sekolah dan Kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	6	1	16,67
	10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	13	2	15,38
	11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan Kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendamping sehingga berada di lingkungan yang terlindung)	48	13	27
	12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	4	0	0
5		Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	7900	5566	70,46
	1	Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	7900	5566	70,46
	2	Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus Perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan Perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam anak Perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kodware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	100	100	100
	3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistic, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	1	1	100
	4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas dan anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb)	200	0	0
	5	Pelayanan dukungan psikososial (Upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas di luar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/stuasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/ trauma healing dsb)	200	0	0

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Jombang.

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial

Dalam mensinkronkan antara visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Dinas Sosial Kabupaten Jombang mengembangk amanah untuk mewujudkan misi kesatu, yaitu “Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, berbudi pekerti luhur, religius dan berdaya saing global. Misi ini memiliki keterkaitan erat dengan peran Dinas Sosial dalam meningkatkan kualitas hidup kelompok miskin dan rentan melalui perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial serta penguatan kapasitas pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Dinas Sosial turut berperan dalam menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing dengan memberikan intervensi sosial yang terarah, berkeadilan, dan berkelanjutan

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana kerja perubahan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan aksestabilitas prioritas pelaksanaan, dapat dioperasikan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Perencanaan antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Sosial Kabupaten Jombang senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pelayanan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau

sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Jombang sebagai unsur pelayan publik, diharapkan mampu melaksanakan perencanaan pelayanan dengan baik. Dalam mencapai tujuan dan sasaran tidak bias terlepas dari faktor-faktor lingkungan strategis yang seringkali juga disebut faktor internal dan eksternal. Maka dapat dilakukan analisa lingkungan. Analisa ini terdiri dari analisa internal dan eksternal. Analisa Internal meliputi kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), sedangkan analisa eksternal terdiri atas tantangan (opportunity) dan peluang (treaths).

Analisis SWOT yang digunakan meliputi faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi dan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungan yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Sehingga nantinya dapat diketahui bagaimana cara kita memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada untuk meminimalisasi/meniadakan hambatan dan ancaman, agar dapat digunakan untuk menganalisa atau menentukan isu-isu strategis yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Jombang dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul terutama dalam perencanaan pelayanan publik di Kabupaten Jombang dalam kurun waktu 5 tahun.

Dinas Sosial Kabupaten Jombang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Sebagai OPD baru Dinas Sosial dituntut untuk segera menyesuaikan dengan kondisi OPD-OPD yang lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang ini sekaligus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, karena penyelenggaraan kesejahteraan sosial memegang peran yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu untuk melaksanakan tugas-tugas operasional dibidang sosial diperlukan langkah-langkah terobosan untuk mewujudkan manajemen

penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan tertib, efisien dan efektif. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi

Dinas sosial dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibidang sosial dan sebagai penyelenggaran kesejahteraan sosial mempunyai permasalahan dan hambatan yaitu :

b. Permasalahan

- Kurangnya tingkat kemandirian PMKS
- Belum maksimalnya pemutakhiran DTKS
- Belum optimalnya penerapan SPM bidang sosial
- Belum optimalnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial

c. Hambatan

- Cakupan atau jangkaun pelayanan program kesejahteraan sosial yang dibagi ke dalam tiga pilar yaitu rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan kelembagaan sosial masih terbatas.
- Kegiatan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS masih perlu peningkatan ketepatan dan keakuratan proses dan penerima manfaat
- Belum adanya kawasan/ tempat rehabilitasi sosial
- Peran masyarakat melalui lembaga kesejahteraan sosial dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal
- Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal subtansi teknis dan praktis masih terbatas, koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal
- Peran pemerintah masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PMKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan itu sendiri

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi

Dinas sosial dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibidang sosial dan sebagai penyelenggaraan kesejahteraan sosial mempunyai permasalahan dan hambatan yaitu :

a. Permasalahan

- Kurangnya tingkat kemandirian PMKS
- Belum maksimalnya pemutakhiran DTKS
- Belum optimalnya penerapan SPM bidang sosial
- Belum optimalnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial

b. Hambatan

- Cakupan atau jangkaun pelayanan program kesejahteraan sosial yang dibagi ke dalam tiga pilar yaitu rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan kelembagaan sosial masih terbatas.
- Kegiatan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS masih perlu peningkatan ketepatan dan keakuratan proses dan penerima manfaat
- Belum adanya kawasan/ tempat rehabilitasi sosial
- Peran masyarakat melalui lembaga kesejahteraan sosial dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal
- Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas, koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal
- Peran pemerintah masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PMKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan itu sendiri

3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial

a. Tantangan (threatment)

Tantangan yang perlu diantisipasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang sebagai berikut:

1. Tantangan secara umum

- Penurunan angka PMKS yang melambat;
- Belum optimalnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan dan penganggaran program pembangunan kesejahteraan sosial antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah/Kota dalam rangka menciptakan pelaksanaan program yang sistemik;
- Masih perlunya peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial, sehingga berpengaruh pada pencapaian kinerja pembangunan bidang kesejahteraan sosial secara umum dan dapat meningkatkan efektifitas;
- Masih tingginya disparitas dan angka kemiskinan di Jawa Timur dan semakin berkembangnya variansi permasalahan kesejahteraan sosial, yang belum sebanding dengan kapasitas pelayanan sosial;
- Peran serta masyarakat dan dunia usaha masih perlu ditingkatkan, hal ini penting mengingat keterbatasan sumber dana pembangunan kesejahteraan sosial yang disediakan pemerintah.

2. Bidang Rehabilitasi Sosial

Implikasi negatif perkembangan dinamika sosial yang memicu munculnya permasalahan sosial kontemporer, seperti human trafficking, pekerja migran yang bermasalah, balita dan lanjut usia yang ditelantarkan, HIV/AIDS, permasalahan lintas provinsi dan lain-lain.

3. Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial

- Masih banyak masyarakat miskin yang belum masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial
- Belum adanya bantuan stimulus bagi KPM PKH graduasi dari kepesertaan program pemerintah
- Ketidakpastian iklim dan perubahan kondisi alam serta fluktuasi interaksi politik, sosial budaya yang mengakibatkan resistensi

terjadinya bencana alam dan sosial

4. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Sosial

- Kecenderungan berkembangannya sifat individualismen dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan semakin lunturnya nilai kesetiakawanan sosial;
- Belum optimalnya peran komite penanggulangan PMKS di Kabupaten Jombang
- Belum optimalnya pengelolaan taman makam pahlawan

b. Peluang (Opportunity).

Selain berbagai tantangan yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Jombang dalam menyelenggarakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial juga terdapat berbagai peluang yang dapat menjadi potensi dalam pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jombang antara lain yaitu :

1. Dukungan peraturan dan perundang undangan sebagai penunjang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2. Semakin meningkatnya Komitmen Legislatif dalam penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jombang;
3. Semakin meningkatnya dukungan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jombang;
4. Berkembangnya kelembagaan sosial peduli permasalahan kesejahteraan sosial, yang diindikasikan dengan semakin meningkatnya jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di masyarakat;
5. Aktifnya peran dunia masyarakat serta luasnya jejaring sosial dalam penanganan masalah sosial.

Dengan berbagai ancaman/tantangan yang dihadapi oleh Dinas Sosial tersebut, maka mutlak diperlukan peningkatan kerja sama antar sektor

dan berbagai pemangku kepentingan untuk menjangkau masyarakat miskin dan rentan dalam upaya percepatan pengurangan kemiskinan.

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan perubahan program dan kegiatan prioritas tahun 2026.

a).

Rancangan isu strategis RKPD Jawa Timur tahun 2026, yaitu :

- 1) Percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas & nilai tambah sumber daya local
- 2) Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkelanjutan
- 3) Pemenuhan kebutuhan layanan dasar bidang Pendidikan, Kesehatan, perumahan, sanitasi & sosial dasar khususnya peningkatan lapangan kerja, penanganan stunting, dan penanggulangan kemiskinan
- 4) Kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya local
- 5) Pemerataan kemandirian pangan & pemanfaatan potensi energi baru terbarukan
- 6) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kapasitas bencana
- 7) Tata kelola pemerintahan yang belum optimal

b. Isu strategis Kabupaten Jombang

Berdasarkan penelaahan terhadap isu internasional, nasional, kebijakan provinsi serta permasalahan Pembangunan Kabupaten Jombang, maka ditetapkan isu-isu strategis Pembangunan jangka menengah Kabupaten Jombang sebagai berikut:

- 1) Pengarusutamaan SDGs dan SDGs Desa
- 2) Tata Kelola pemerintah dan pelayanan public
- 3) Kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter
- 4) Mewujudkan harmoni sosial
- 5) Penguatan daya saing
- 6) Pemantapan ekonomi dan ketahanan ekonomi
- 7) Pelestarian lingkungan (pencemaran)

8) Pengembangan ekonomi kreatif dan industri kreatif

9) Pengentasan kemiskinan melalui penanganan kemiskinan ekstrim

c. Isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Jombang

Tema dan arahan kebijakan pembangunan Kabupaten Jombang tentunya harus berkorelasi dengan arah kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Timur, sehingga perlu penyesuaian pembangunan Kabupaten Jombang tahun 2025. Tema pembangunan tahun 2025 adalah **“Hilirisasi Agribisnis”**

Adapun prioritas pembangunan kabupaten Jombang tahun 2025, yaitu :

1. Peningkatan kualitas pelayanan public bagi masyarakat, keamanan dan ketentraman umum
2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk membangun SDM yang Berkarakter, Berdaya Saing dan Inovatif serta pengentasan kemiskinan ekstrem
3. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung peningkatan investasi daya saing dan produk unggulan daerah
4. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup

Dengan adanya tema dan prioritas pembangunan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang, maka Dinas Sosial sebagai pelaksana pemerintahan bidang sosial mempunyai tugas untuk mewujudkan prioritas pembangunan tahun 2023, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Peningkatan sumber daya manusia

Dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial diperlukan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas atau telah tersertifikasi, hal tersebut dapat dicapai dengan adanya pendidikan pelatihan dalam pengelolaan dan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh para stakeholder Dinas Sosial yaitu tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pekerja sosial profesional, relawan sosial, dan penyuluh sosial. Dengan semakin

handalnya sumber daya manusia maka diharapkan pembinaan dan pendidikan ketrampilan yang diberikan kepada PMKS akan semakin bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PMKS, sehingga diharapkan nanti PMKS akan semakin mandiri dan keluar dari kemiskinan dengan graduasi mandiri.

b. Peningkatan sarana dan prasarana

Peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam penanganan PMKS, seperti :

1. Sarana dan prasarana pelayanan sosial
2. Pusat usaha kesejahteraan sosial (puskessos)
3. Kelompok usaha bersama (KUBE)
4. Pusat rehabilitasi sosial
5. Pusat pendidikan dan pelatihan
6. Balai/panti sosial
7. Rumah singgah

c. Sumber pendanaan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah, masyarakat serta dunia usaha. Pengumpulan, pengalokasian dan penggunaan sumber pendanaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Koordinasi dan Sinergitas dengan OPD terkait

Permasalahan kemiskinan yang kompleks di Kabupaten Jombang tidak dapat ditangani sendiri oleh Dinas Sosial, oleh karena itu perlu koordinasi dan sinergitas dengan OPD terkait dalam penanganan kemiskinan, yaitu :

- Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda)
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD)
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil)
- Kecamatan

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

- **Tabel 2.4**
Review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Sosial Tahun 2026

No	Rancangan Awaal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	Catatan
1.06.01	Program : penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kab. Jombang	Nilai evaluasi AKIP perangkat daeah	78,55 nilai	5.429.164.097	Program : penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kab. Jombang	Nilai evaluasi AKIP perangkat daeah	78,55 nilai	5.429.164.097	
1.06.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	8.077.950	Kegiatan : Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	8.077.950	
		Kab. Jombang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	103.990.000		Kab. Jombang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	103.990.000	
		Kab. Jombang	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	107 Data	9.750.000		Kab. Jombang	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	107 Data	9.750.000	
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	8.077.950	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	8.077.950	

No	Rancangan Awaal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	Catatan
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	103.990.000	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	103.990.000	
1.06.01.2.01.0009	Pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah	Kab. Jombang	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	107 Data	9.750.000	Pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah	Kab. Jombang	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	107 Data	9.750.000	
1.06.01.2.02	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/ bulan	3.736.606.432	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/ bulan	3.736.606.432	
		Kab. Jombang	Jumlah Dokumen penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	166.290.000		Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	166.290.000	
		Kab. Jombang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	3.235.350		Kab. Jombang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	3.235.350	
		Kab. Jombang	Jumlah laporan keuangan bulanan/tribulanan/ semester SKPD yang disusun	17 laporan	9.878.600		Kab. Jombang	Jumlah laporan keuangan bulanan/tribulanan/ semester SKPD yang disusun	17 laporan	9.878.600	
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/ bulan	3.736.606.432	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/ bulan	3.736.606.432	
1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	166.290.000	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	166.290.000	

No	Rancangan Awaal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	Catatan
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	3.235.350	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	3.235.350	
1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ tribulanan/ semester SKPD	Kab. Jombang	Jumlah laporan keuangan bulanan/tribulanan/ semester SKPD yang disusun	17 laporan	9.878.600	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ tribulanan/ semester SKPD	Kab. Jombang	Jumlah laporan keuangan bulanan/tribulanan/ semester SKPD yang disusun	17 laporan	9.878.600	
1.06.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Jombang	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	20 paket	12.000.000	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Jombang	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	20 paket	12.000.000	
1.06.01.2.05.0002	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Jombang	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	20 paket	12.000.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Jombang	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	20 paket	12.000.000	
1.06.01.2.06	Kegiatan : administrasi umum perangkat daerah	Kab. Jombang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	5.597.950	Kegiatan : administrasi umum perangkat daerah	Kab. Jombang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	5.597.950	
		Kab. Jombang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	12.799.300		Kab. Jombang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	12.799.300	
		Kab. Jombang	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	1.525.200		Kab. Jombang	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	1.525.200	
		Kab. Jombang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	104.996.000		Kab. Jombang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	104.996.000	
		Kab. Jombang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	10.988.350		Kab. Jombang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	10.988.350	
		Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	5.556.000		Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	5.556.000	

No	Rancangan Awaal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	Catatan
		Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	86.490.500		Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	86.490.500	
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerapan bangunan kantor	Kab. Jombang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	5.597.950	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerapan bangunan kantor	Kab. Jombang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	5.597.950	
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Jombang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	12.799.300	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Jombang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	12.799.300	
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Jombang	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	1.525.200	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Jombang	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	1.525.200	
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistic kantor	Kab. Jombang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	104.996.000	Penyediaan bahan logistic kantor	Kab. Jombang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	104.996.000	
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Jombang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	10.988.350	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Jombang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	10.988.350	
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	5.556.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	5.556.000	
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	86.490.500	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	86.490.500	
1.06.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Jombang	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung atau bangunan lainnya	8 unit	122.148.700	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Jombang	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung atau bangunan lainnya	8 unit	122.148.700	

No	Rancangan Awaal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	Catatan
1.06.01.2.07.0010	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Jombang	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung atau bangunan lainnya	8 unit	122.148.700	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Jombang	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung atau bangunan lainnya	8 unit	122.148.700	
1.06.01.2.08	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	127.800.000	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	127.800.000	
		Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	562.078.500		Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	562.078.500	
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	127.800.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	127.800.000	
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	562.078.500	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	562.078.500	
1.06.01.2.09	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Jombang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	41.610.000	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Jombang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	41.610.000	
		Kab. Jombang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 unit	251.574.971		Kab. Jombang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 unit	251.574.971	
		Kab. Jombang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	123.218.244		Kab. Jombang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	123.218.244	

No	Rancangan Awaal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	Catatan
		Kab. Jombang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	38 unit	26.180.000		Kab. Jombang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	38 unit	26.180.000	
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Jombang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	41.610.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Jombang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	41.610.000	
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Jombang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 unit	251.574.971	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Jombang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 unit	251.574.971	
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Jombang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	123.218.244	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Jombang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	123.218.244	
1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan	Kab. Jombang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	38 unit	26.180.000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan	Kab. Jombang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	38 unit	26.180.000	
1.06.02	Program pemberdayaan sosial	Kab. Jombang	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berdaya	100,00%	1.220.023.750	Program pemberdayaan sosial	Kab. Jombang	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berdaya	100,00%	1.220.023.750	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	Catatan
1.06.02.2.02	Kegiatan pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten-kota	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	17 dokumen	15.975.000	Kegiatan pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten-kota	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	17 dokumen	15.975.000	
1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	17 dokumen	15.975.000	Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	17 dokumen	15.975.000	
1.06.02.2.03	Kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/ kta	Kab. Jombang	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	80 keluarga	40.490.000	Kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/ kta	Kab. Jombang	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	80 keluarga	40.490.000	
		Kab. Jombang	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	87 lembaga	638.576.000		Kab. Jombang	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	87 lembaga	638.576.000	
		Kab. Jombang	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	221 orang	235.525.000		Kab. Jombang	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	221 orang	235.525.000	
		Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	375 orang	31.796.950		Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	375 orang	31.796.950	

No	Rancangan Awaal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	Catatan
		Kab. Jombang	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	35 orang	23.207.500		Kab. Jombang	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	35 orang	23.207.500	
		Kab. Jombang	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	306 desa/kelurahan	62.244.450		Kab. Jombang	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	306 desa/kelurahan	62.244.450	
		Kab. Jombang	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	70 orang	172.208.850		Kab. Jombang	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	70 orang	172.208.850	
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	80 keluarga	40.490.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	80 keluarga	40.490.000	
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	87 lembaga	638.576.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	87 lembaga	638.576.000	

No	Rancangan Awaal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	Catatan
1.06.02.2.03.0010	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Kab. Jombang	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	221 orang	235.525.000	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Kab. Jombang	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	221 orang	235.525.000	
1.06.02.2.03.0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	375 orang	31.796.950	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	375 orang	31.796.950	
1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Jombang	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	36 orang	23.207.500	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Jombang	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	36 orang	23.207.500	
1.06.02.2.03.0013	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	306 desa/ kelurahan	62.244.450	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	306 desa/ kelurahan	62.244.450	

No	Rancangan Awaal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	Catatan
1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	70 orang	172.208.850	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	70 orang	172.208.850	
1.06.04	Program rehabilitasi sosial	Kab. Jombang	Persentase penerima manfaat yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	1,50%	1.787.142.900	Program rehabilitasi sosial	Kab. Jombang	Persentase penerima manfaat yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	1,50%	1.787.142.900	
1.06.04.2.01	Kegiatan : rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, alanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	465 orang	1.124.400.000	Kegiatan : rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, alanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	465 orang	1.124.400.000	
		Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	125 orang	37.500.000		Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	125 orang	37.500.000	
		Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	56.473.900		Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	56.473.900	
		Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	79.075.000		Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	79.075.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	Catatan
		Kab. Jombang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	130 orang	145.632.500		Kab. Jombang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	130 orang	145.632.500	
		Kab. Jombang	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	37.000.000		Kab. Jombang	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	37.000.000	
		Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	25 orang	2.175.000		Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	25 orang	2.175.000	
		Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	8.400.000		Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	8.400.000	
		Kab. Jombang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	9.385.000		Kab. Jombang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	9.385.000	
		Kab. Jombang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	6.385.000		Kab. Jombang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	6.385.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	Catatan
		Kab. Jombang	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi				Kab. Jombang	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi			
		Kab. Jombang	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	18.284.500		Kab. Jombang	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	18.284.500	
		Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	70 orang	24.500.000		Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	70 orang	24.500.000	
		Kab. Jombang	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	10 orang	19.282.000		Kab. Jombang	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	10 orang	19.282.000	
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan permakanan	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	465 orang	1.124.400.000	Penyediaan permakanan	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	465 orang	1.124.400.000	
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan sandang	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	125 orang	37.500.000	Penyediaan sandang	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	125 orang	37.500.000	

No	Rancangan Awaal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	Catatan
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	56.473.900	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	56.473.900	
1.06.04.2.01.0004	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	79.075.000	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	79.075.000	
1.06.04.2.01.0005	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Kab. Jombang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	130 orang	145.632.500	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Kab. Jombang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	130 orang	145.632.500	
1.06.04.2.01.0006	pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Kab. Jombang	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	37.000.000	pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Kab. Jombang	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	37.000.000	
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	25 orang	2.175.000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	25 orang	2.175.000	
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	8.400.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	8.400.000	

No	Rancangan Awaal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	Catatan
1.06.04.2.01.0011	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Kab. Jombang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	9.385.000	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Kab. Jombang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	9.385.000	
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Jombang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	6.385.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Jombang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	6.385.000	
1.06.04.2.01.0015	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	Kab. Jombang	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi			Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	Kab. Jombang	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi			
1.06.04.2.01.0016	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Kab. Jombang	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	18.284.500	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Kab. Jombang	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	18.284.500	
1.06.04.2.01.0017	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	70 orang	24.500.000	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	70 orang	24.500.000	
1.06.04.2.01.0018	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	10 orang	19.282.000	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	10 orang	19.282.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	Catatan
1.06.04.2.02	Kegiatan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan napza di luar panti	Kab. Jombang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota	70 orang	21.000.000	Kegiatan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan napza di luar panti	Kab. Jombang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota	70 orang	21.000.000	
		Kab. Jombang	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan diluar panti kewenangan Kabupaten/Kota	70 orang	24.500.000		Kab. Jombang	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan diluar panti kewenangan Kabupaten/Kota	70 orang	24.500.000	
		Kab. Jombang	Jumlah peserta bimbingan fisik, mentak, spiritual, dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	270 orang	137.375.000		Kab. Jombang	Jumlah peserta bimbingan fisik, mentak, spiritual, dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	270 orang	137.375.000	
		Kab. Jombang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	12.170.000		Kab. Jombang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	12.170.000	
		Kab. Jombang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	50 orang	17.220.000		Kab. Jombang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	50 orang	17.220.000	
		Kab. Jombang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	6.385.000		Kab. Jombang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	6.385.000	

No	Rancangan Awaal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	Catatan
1.06.04.2.03.0004	Penyediaan Sandang	Kab. Jombang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota	70 orang	21.000.000	Penyediaan Sandang	Kab. Jombang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota	70 orang	21.000.000	
1.06.04.2.02.0006	Penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti	Kab. Jombang	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan diluar panti kewenangan Kabupaten/Kota	70 orang	24.500.000	Penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti	Kab. Jombang	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan diluar panti kewenangan Kabupaten/Kota	70 orang	24.500.000	
1.06.04.2.02.0007	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Kab. Jombang	Jumlah peserta bimbingan fisik, mentak, spiritual, dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	270 orang	137.375.000	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Kab. Jombang	Jumlah peserta bimbingan fisik, mentak, spiritual, dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	270 orang	137.375.000	
1.06.04.2.02.0011	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Kab. Jombang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	12.170.000	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Kab. Jombang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	12.170.000	
1.06.04.2.02.0012	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Kab. Jombang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	50 orang	17.220.000	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Kab. Jombang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	50 orang	17.220.000	
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Jombang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	6.385.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Jombang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	6.385.000	
1.06.05	Program perlindungan dan Jaminan sosial	Kab. Jombang	Persentase penerima bantuan sosial yang mendapatkan akses layanan dasar dan bantuan usaha	95,67 persen	16.226.984.238	Program perlindungan dan Jaminan sosial	Kab. Jombang	Persentase penerima bantuan sosial yang mendapatkan akses layanan dasar dan bantuan usaha	95,67 persen	16.226.984.238	
1.06.05.2.02	Kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten-kota	Kab. Jombang	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	105.544 orang	78.746.250	Kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah	Kab. Jombang	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	105.544 orang	78.746.250	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	Catatan
						kabupaten-kota					
		Kab. Jombang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	140 orang	144525000		Kab. Jombang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	140 orang	144525000	
		Kab. Jombang	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	17.713 orang	15986248488		Kab. Jombang	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	17.713 orang	15986248488	
		Kab. Jombang	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	1705 usulan	17464500		Kab. Jombang	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	1705 usulan	17464500	
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	105.544 orang	78.746.250	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	105.544 orang	78.746.250	
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Jombang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	140 orang	144.525.000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Jombang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	140 orang	144.525.000	
1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Jombang	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	17.713 orang	15.986.248.488	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Jombang	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	17.713 orang	15.986.248.488	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	Catatan
1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	1705 usulan	17.464.500	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	1705 usulan	17.464.500	
1.06.06	Program bencana	Kab. Jombang	Persentase kejadian bencana yang tertangani	100%	520.587.360	Program bencana	Kab. Jombang	Persentase kejadian bencana yang tertangani	100%	520.587.360	
1.06.06.2.01	Kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/ kota	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	7900 orang	247.590.760	Kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/ kota	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	7900 orang	247.590.760	
		Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang	33.984.000		Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang	33.984.000	
		Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang	12.160.000		Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang	12.160.000	
		Kab. Jombang	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang	12.160.000		Kab. Jombang	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang	12.160.000	
		Kab. Jombang	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 unit	9.816.300		Kab. Jombang	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 unit	9.816.300	

No	Rancangan Awaal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	Catatan
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	7900 orang	247.590.760	Penyediaan Makanan	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	7900 orang	247.590.760	
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang	33.984.000	Penyediaan Sandang	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang	33.984.000	
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang	12.160.000	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang	12.160.000	
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Jombang	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang	12.160.000	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Jombang	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang	12.160.000	
1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Jombang	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 unit	9.816.300	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Jombang	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 unit	9.816.300	
1.06.06.2.02	Kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/ kota	Kab. Jombang	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 kampung	34.456.300	Kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/ kota	Kab. Jombang	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 kampung	34.456.300	

No	Rancangan Awaal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	Catatan
		Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	135.420.000		Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	135.420.000	
		Kab. Jombang	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	300 orang	35.000.000		Kab. Jombang	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	300 orang	35.000.000	
1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana	Kab. Jombang	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 kampung	34.456.300	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana	Kab. Jombang	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 kampung	34.456.300	
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	135.420.000	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	135.420.000	
Sosialisasi dan Edukasi	1.06.06.2.02.0008 penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Kab. Jombang	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	300 orang	35.000.000	1.06.06.2.02.0008 penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Kab. Jombang	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	300 orang	35.000.000	
1.06.07	Program pengelolaan taman makam pahlawan	Kab. Jombang	Persentase taman makam pahlawan (TMP) yang sesuai standar	95%	66.550.350	Program pengelolaan taman makam pahlawan	Kab. Jombang	Persentase taman makam pahlawan (TMP) yang sesuai standar	95%	66.550.350	
1.06.07.2.01	Kegiatan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/ kota	Kab. Jombang	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan	1 dokumen	52.200.000	Kegiatan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/ kota	Kab. Jombang	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan	1 dokumen	52.200.000	

No	Rancangan Awaal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	Catatan
		Kab. Jombang	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 makam	14.350.350		Kab. Jombang	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 makam	14.350.350	
1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabuoaten/kota	Kab. Jombang	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan	1 dokumen	52.200.000	Rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabuoaten/kota	Kab. Jombang	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan	1 dokumen	52.200.000	
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Kab. Jombang	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 makam	14.350.350	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Kab. Jombang	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 makam	14.350.350	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan berdasarkan kewenangan yang diamanatkan ke Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Penelaahan ini dilakukan dari awal kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan yang dialokasikan berdasarkan kewenangan. Adapun tahun 2025 terdapat usulan program dan kegiatan masyarakat pada Dinas Sosial Kabupaten Jombang dan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun 2026

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program pemberdayaan sosial Kegiatan: pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Jombang	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	572.200.000	20 karang taruna

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1. Telaah terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi

A. Kebijakan Nasional

Kementerian PPN/Bappenas menyusun rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2025-2045 dalam mendukung visi Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045. Misi RPJMN, yaitu :

- Asta Cita 1 : Memperkokok ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
- Asta Cita 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
- Asta Cita 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
- Asta Cita 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
- Asta Cita 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
- Asta Cita 6 : Membangun dari desa dari bawah untuk

pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan

Asta Cita 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

Asta Cita 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur

Dalam pembangunan nasional 2025-2029, Kementerian Sosial mempunyai mandat untuk mewujudkan prioritas nasional (PN), yakni:

1. Prioritas Nasional (PN 4)

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas, dengan sasaran utama keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif.

2. Prioritas Nasional (PN 6)

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan, dengan sasaran utama mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan, melalui program perlindungan sosial adaptif dan inklusif

dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas
Kementerian Sosial mempunyai **VISI**, yakni:

“Kesejahteraan Sosial Sepanjang Hayat yang berkelanjutan dan berkeadilan”

Misi:

- 1) Mewujudkan kesejahteraan sepanjang hayat yang kolaboratif, adaptif, emansipatif, partisipatif, dan inklusif
- 2) Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang baik

dan bersih

Tujuan dan sasaran Kementerian Sosial

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan	Sistem kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan yang inklusif
Tata kelola kementerian sosial yang agile, berkualitas dan efisien	Tata kelola kesejahteraan sosial yang berdampak indeks reformasi birokrasi

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial

No	Arah Kebijakan	Strategi
1	Penguatan data tunggal terintegrasi yang terupdate secara dinamis	• Meningkatkan kualitas dan kapasitas sistem informasi kesejahteraan sosial untuk menjamin ketersediaan pengelolaan data • Menjamin keamanan sistem informasi kesejahteraan sosial untuk menjamin DTSEN tetap rahasia dan aman dari segala risiko serangan/insiden siber • Melakukan pemeliharaan secara layak dan baik untuk menjamin sistem informasi kesejahteraan sosial yang memadai untuk memastikan integritas data • Pengembangan infrastruktur sistem informasi kesejahteraan sosial yang memadai • Pemutakhiran data berkelanjutan melalui sinkronisasi DTSEN dengan K/L • Membuka akses pemanfaatan data untuk mendukung program penyelenggaraan kesejahteraan sosial • Menyajikan data statistik populasi dari kriteria PPKS untuk mempermudah jangkauan intervensi yang tepat sasaran • Meningkatkan kapasitas SDM teknologi informasi dan petugas di daerah dalam mengelola data • Memastikan data tunggal yang digunakan oleh instansi dalam pemberian program bantuan dapat digunakan sesuai tujuan program bantuan K/L
2	Kolaborasi dan integrasi program bersama pemerintah daerah	• Penyelarasan target pembangunan kementerian sosial • Penyelarasan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) urusan sosial oleh pemerintah daerah • Pelibatan masyarakat di daerah untuk meningkatkan efektivitas program • Koordinasi secara periodik dengan pemerintah daerah dalam upaya menjalankan kebijakan kementerian sosial
3	Pengembangan care economy melalui perluasan pelibatan caregiver	• Perawatan berbasis masyarakat yang melibatkan komunitas dalam memberikan perawatan • Perluasan perlindungan sosial dan kesejahteraan melalui peningkatan partisipasi perempuan • Pengakuan profesi keperawatan sebagai upaya dalam peningkatan ekonomi • Cakupan jaminan sosial bagi profesi keperawatan • Pengembangan cara ekonomi secara terlembaga • Diversifikasi sumber pembiayaan

4	Kerjasama penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan swasta, BUMN, dan filantropi	• Peningkatan dan perluasan jejaring kerjasama (networking) dengan stakeholder • Kolaborasi dan sinergi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan stakeholder • Optimalisasi pelaksanaan program corporate social responsibility (CSR) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial • Komunikasi yang efektif dan berkelanjutan dengan stakeholder
5	Penguatan kompetensi dan tingkat kesejahteraan pilar-pilar sosial	• Pendataan SDM kesos yang terintegrasi dan valid • Penyelenggaraan beragam program belajar seperti diklat, mentorship, dan kesempatan penguatan kapasitas individu lainnya, seperti workshop, motivational events, tugas belajar dll • Mendorong perumusan kebijakan pengembangan kompetensi yang adaptif • Peningkatan kualitas alumni pendidikan tinggi kesejahteraan sosial • Penguatan dan pengembangan mekanisme insentif bagi SDM kesos salah satunya melalui peningkatan tali asih dan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja • Peningkatan dan pengendalian standar profesi jabatan fungsional pekerja sosial dan penyuluh sosial yang meliputi kewenangan pengelolaan, prosedur, dan metodologi pelaksanaan tugas JF • Peningkatan jumlah SDM kesos yang tersertifikasi kompeten • Memperkuat kapasitas lembaga penyelenggara layanan kesejahteraan sosial melalui akreditasi dan pembinaan serta pengawasan berkelanjutan
6	Menjamin bantuan sosial tepat sasaran dan peranan kartu kesejahteraan	• Meningkatkan peran pendamping penerima jaminan dan perlindungan sosial dalam peningkatan akurasi bantuan serta dalam upaya mengubah perilaku adiksi penerima bantuan • Meningkatkan ketepatan sasaran dan pemanfaatan jaminan sosial melalui revitalisasi mekanisme verifikasi komitmen bantuan bersyarat • Integrasi, transformasi dan digitalisasi bantuan dan jaminan sosial yang diselenggarakan kementerian sosial dengan bantuan sosial dari K/L lain sehingga dapat menjangkau kelompok masyarakat sesuai kebutuhan dan kerentanan serta mampu mencapai kesinambungan intervensi untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat

7	Penguatan unit layanan sosial sebagai centre of excellence	• Mendorong pengembangan layanan pusat kesejahteraan sosial keseluruhan daerah • Pelaksanaan monitoring dan evaluasi lembaga kesejahteraan sosial • Pengembangan inovasi dan model rehabilitasi sosial yang efektif untuk sentra kesejahteraan sosial • Peningkatan sarana dan prasarana layanan kesejahteraan sosial • Memelihara dan mengembangkan keahlian tertentu (expertise) sentra sebagai centre of excellence
8	Integrasi pemberdayaan KPM masyarakat lintas K/L	• Optimalisasi pemetaan KPM berbasis kebutuhan pemberdayaan • Kolaborasi dan sinergi dalam pemberdayaan KPM dengan kementerian/lembaga (K/L) lainnya • Meningkatkan kualitas pelayanan rujukan bagi KPM yang diberdayakan oleh kementerian/Lembaga (K/L) lainnya • Meningkatkan akses terhadap permodalan usaha bagi KPM
9	Menyediakan pelayanan pendidikan fakir miskin melalui sekolah rakyat	• Pendirian dan penyelenggaraan sekolah berasrama bagi peserta didik di jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah menengah atas • Penyelenggaraan pendidikan sekolah rakyat yang mengikuti kurikulum nasional yang berlaku, dengan memenuhi delapan standar pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan beserta aturan turunannya

Konsep 12-PAS (Pemerlu Atensi Sosial) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai kelompok yang memerlukan perhatian dan intervensi sosial. Kelompok ini meliputi:

1. Anak-anak rentan
balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak difabel, anak korban tindak kekerasan, anak jalanan, anak yang memerlukan perlindungan khusus
2. Penyandang disabilitas
mereka yang menyandang disabilitas
3. Lansia terlantar
Mereka lanjut usia yang terlantar
4. Mereka yang berpendapatan rendah
Gelandangan, pengemis dan pemulung
5. Korban bencana
Mereka yang menjadi korban bencana alam/non alam dan bencana

sosial

6. Afirmasi khusus

Komunitas Adat Terpencil (KAT)

7. Wargabinaan

Mereka bekas wargabinaan lembaga pemasyarakatan (NAPI, NAPITER)

8. Korban kekerasan

Korban tindak kekerasan, korban trafficking, pekerja migran bermasalah sosial

9. Korban Napza dan HIV/AIDS

Mereka yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA dan penderita HIV/AIDS

10. Mereka yang bermasalah sosial

Kelompok minoritas, keluarga bermasalah sosial psikologis

11. Perempuan rentan

Perempuan yang rawan ekonomi, dan tuna susila

B. Kebijakan Provinsi Jawa Timur

Sebagaimana arah kebijakan tahun 2026 pada Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 yaitu percepatan transformasi sosial ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta diselaraskan terhadap RKP tahun 2026, maka **tema RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2026 adalah Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Pembangunan Wilayah Strategis dan Peningkatan Produktivitas Menuju Kemandirian Pangan dan Energi**

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan manifestasi tanggung jawab pemerintah sebagai urusan wajib bidang sosial dalam penyediaan pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat terutama pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Diharapkan upaya tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dalam melaksanakan peran dan fungsi sosial dalam masyarakat.

Kinerja urusan sosial setiap tahunnya menunjukkan hasil yang

baik. Untuk mendukung program pemerintah dalam penanganan PPKS yang inklusif, selain kebijakan kesejahteraan sosial, penanganan PPKS juga diarahkan kepada pemulihan keberfungsian sosial PPKS. Dari kebijakan ini diharapkan PPKS dapat keluar dari beban kemiskinan. Kemandirian PPKS dapat dilakukan melalui pemberdayaan sosial, pelatihan dan ketrampilan, permodalan dan dukungan lingkungan sosial yang kondusif. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menurunkan PPKS antara lain dengan memberikan pembinaan, bantuan maupun perlindungan, sehingga PPKS dapat hidup secara normal.

Indikator urusan sosial di Jawa Timur, yakni:

1. Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar dan pulihnya keberfungsian sosial PPKS
2. Persentase masyarakat miskin dan rentan mendapatkan program kesejahteraan sosial yang inklusif
3. Indeks kesejahteraan sosial

C. Kebijakan Kabupaten Jombang

Visi Bupati dan wakil bupati terpilih periode 2025-2029 adalah **“Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua”**. Visi ini menggambarkan tekad pemerintah Kabupaten Jombang untuk mewujudkan pembangunan yang merata, adil dan berkelanjutan di segala sektor, termasuk sektor kesejahteraan sosial. Penjelasan visi yang dimaksud dijabarkan lebih lanjut dalam dua pokok visi berikut:

- 1) **“MAJU”** mengandung makna kondisi terwujudnya sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Jombang yang cerdas, berdaya saing, berbudaya, religius, sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu terlihat aktif dalam proses pembangunan serta transformasi sosial yang inklusif, harmonis dan berkelanjutan
- 2) **“SEJAHTERA”**, bermakna kondisi Kabupaten Jombang di tahun 2029 yang terpenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya, dilandasi dengan

kemandirian ekonomi daerah dan masyarakat, ketahanan sosial, peningkatan kualitas kehidupan yang ditopang dengan tata kelola pemerintahan transformatif yang bersih dan melayani, efektif dan efisien, serta transparan

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jombang yang telah ditetapkan maka misi pembangunan Kabupaten Jombang tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, berbudi pekerti luhur, religius dan berdaya saing global
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat dan daerah secara berkesinambungan
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan
4. Menghadirkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif

Tujuan adalah gambaran mengenai kondisi yang ingin dicapai dalam pembangunan, sehingga menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPD Kabupaten Jombang. Tujuan pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Jombang 2025-2029 dijabarkan menjadi 5 (lima), yaitu :

TUJUAN	SASARAN
Tujuan 1: Terciptanya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan kesejahteraan sosial yang merata	- Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang sehat, produktif, dan berdaya saing - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
Tujuan 2: Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	- Meningkatnya PDRB sektor unggulan daerah - Meningkatnya investasi daerah - Meningkatnya pemerataan pendapatan kelompok masyarakat menengah dan perdesaan
Tujuan 3: Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan	- Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman - Meningkatnya pembangunan infrastruktur pekerjaan umum - Meningkatnya pelayanan infrastruktur perhubungan

TUJUAN	SASARAN
	- Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan
Tujuan 4: Terwujudnya ketahanan sosial dan budaya berbasis kearifan lokal	Terwujudnya kenyamanan dan kesalehan sosial dalam masyarakat
Tujuan 5: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	- Terwujudnya transformasi birokrasi berbasis digital - Terbangunnya perilaku birokrasi yang bersih, akuntabel, dan transparan dengan ASN yang profesional - Tersedianya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif

Tema dan arahan kebijakan pembangunan Kabupaten Jombang tentunya harus berkorelasi dengan arah kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Timur, sehingga perlu penyesuaian pembangunan Kabupaten Jombang tahun 2026. pembangunan Kabupaten Jombang tahun 2026 mempunyai tema **“Penguatan Pondasi Transformasi Bidang Strategis”**. Dengan prioritas pembangunan pada:

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- 2) Peningkatan kemandirian desa serta kehidupan masyarakat yang harmonis
- 3) Penguatan tata kelola pemerintahan
- 4) Peningkatan akses infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan hidup

Dengan adanya tema dan prioritas pembangunan yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten Jombang, maka Dinas Sosial sebagai pelaksana pemerintahan bidang sosial mempunyai tugas untuk mewujudkan prioritas pembangunan tahun 2026, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Peningkatan sumber daya manusia
- b. Peningkatan sarana dan prasarana
- c. Sumber pendanaan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah, masyarakat serta dunia usaha. Pengumpulan, pengalokasian dan penggunaan sumber

pendanaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

- d. Koordinasi dan sinergitas dengan OPD terkait

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Jombang tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator kinerja sasaran
1	Meningkatkan kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase penurunan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Meningkatnya akses terhadap layanan sosial	Indeks peranan sosial
				Indeks pemenuhan kebutuhan dasar
				Capaian SPM bidang sosial
3	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi pada Dinas Sosial	Indeks reformasi birokrasi (IRB)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi AKIP OPD

3.3. Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan perubahan program dan kegiatan

1. Pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals)

Merupakan sebuah seperangkat tujuan, sasaran dan indikator pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan dan mempertimbangkan dimensi lingkungan dalam mengentaskan kemiskinan. Secara global SDGs pada tingkat daerah akan memberikan gambaran tentang kemajuan pembangunan pada suatu daerah yang dapat dibandingkan dengan hasil-hasil pembangunan secara global. Ada 17 point penting dalam SDGs yakni terciptanya dunia dengan :

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi

10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan
15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Keterkaitan tujuan SDGs dengan tujuan pembangunan nasional mempertegas posisi dan peranan bidang kesejahteraan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menurunkan angka kemiskinan, Dinas Sosial Kabupaten Jombang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin dan rentan, dengan sasaran terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat miskin dan rentan sebesar 37,5% dan meningkatnya kemandirian sosial masyarakat miskin dan rentan

2. Pengentasan kemiskinan

Berdasarkan data BPS Kabupaten Jombang dapat diketahui bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang pada tahun 2024 sebesar 8,6 persen dari target 9,15 persen sehingga capaiannya

sebesar 108 persen, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 110,57 ribu orang.

Pengentasan kemiskinan adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan secara permanen. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang ada di Kabupaten Jombang yang menjadi sasaran program Dinas Sosial. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan pemerintah memberikan program pembinaan lingkungan sosial bidang sosial, dan program perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi keluarga miskin, guna mengangkat derajat hidup mereka, diantaranya melalui bantuan sosial seperti program keluarga harapan (PKH) yang saat ini menjadi program prioritas nasional, bantuan sembako. Selain memberikan bantuan sosial, Dinas Sosial juga memberikan pembinaan dan pendidikan pelatihan bagi PPKS agar dapat meningkatkan taraf hidup mereka sehingga dapat keluar dari kemiskinan dengan kemandiriannya. Hal yang tidak kalah penting dalam pengentasan kemiskinan adalah adanya keterpaduan data sehingga hanya ada satu data fakir miskin. Untuk mendapatkan data yang valid maka pada rencana kerja tahun 2026 Dinas Sosial melakukan koordinasi dan sinergitas dengan OPD terkait.

3. Penurunan stunting

Stunting adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Dengan kata lain stunting merupakan gangguan pertumbuhan pada anak yang disebabkan kurangnya asupan nutrisi selama masa pertumbuhan anak. Sasaran dari program pencegahan stunting adalah ibu hamil dan anak-anak usia 0-2 tahun atau rumah tangga dengan seribu hari pertama kelahiran. Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan yaitu melalui pertemuan peningkatan kapasitas keluarga (P2K2) atau family development session (FDS) kepada KPM PKH, selain pemberian bantuan tunai dan non tunai.

4. Pencapaian SPM

Standar pelayanan minimal atau SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM Dinas Sosial Kabupaten Jombang yang harus diwujudkan yaitu 1) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, 2) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, 3) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, 4) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis, perlindungan dan 5) jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten.

5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Hakikat dari pembangunan ekonomi daerah adalah untuk pendayagunaan potensi dan sumberdaya unggulan yang ada di desa/kelurahan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif. Usaha ini diharapkan bisa meningkatkan kapasitas usaha ekonomi melalui penerapan pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman serta teknologi tepat guna, meningkatkan hasil produksi yang memiliki nilai tambah dan keunggulan komparatif yang berdaya saing dalam pemasaran. Dinas Sosial dalam rangka pengetasan kemiskinan salah satunya dengan optimalisasi KUBE bagi masyarakat miskin.

b. Rekapitulasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2026 terdiri dari enam (6) program, lima belas (15) kegiatan, dan enam puluh tiga (63) sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp.25.250.452.695-

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Jombang
Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun (tahun rencana)/ 2026			Catatan	Prakiraan Maju (2027)	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.06.01	Program : penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	5.429.164.097	APBD Kab. Jombang		100%	5.413.954.254
1.06.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	8.077.950	APBD Kab. Jombang		2 dokumen	8.128.000
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	103.990.000	APBD Kab. Jombang		4 laporan	103.990.000
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	107 Data	9.750.000	APBD Kab. Jombang		107 Data	13.077.950
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	8.077.950	APBD Kab. Jombang		3 dokumen	8.128.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun (tahun rencana)/ 2026			Catatan	Prakiraan Maju (2027)	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	103.990.000	APBD Kab. Jombang		4 laporan	103.990.000
1.06.01.2.01.0009	Pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	107 Data	9.750.000	APBD Kab. Jombang		107 Data	13.077.950
1.06.01.2.02	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/ bulan	3.736.606.432	APBD Kab. Jombang		20 orang/ bulan	3.107.294.647
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	166.290.000	APBD Kab. Jombang		12 dokumen	181.944.000
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	3.235.350	APBD Kab. Jombang		1 laporan	3.235.000
		Jumlah laporan keuangan bulanan/tribulanan/ semester SKPD yang disusun	17 laporan	9.878.600	APBD Kab. Jombang		17 laporan	9.080.000
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/ bulan	3.736.606.432	APBD Kab. Jombang		20 orang/ bulan	3.107.294.647
1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	166.290.000	APBD Kab. Jombang		12 dokumen	181.944.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun (tahun rencana)/ 2026			Catatan	Prakiraan Maju (2027)	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	3.235.350	APBD Kab. Jombang		1 laporan	3.235.000
1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ tribulanan/ semester SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/tribulanan/ semester SKPD yang disusun	17 laporan	9.878.600	APBD Kab. Jombang		17 laporan	9.080.000
1.06.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	20 paket	12.000.000	APBD Kab. Jombang		20 paket	12.000.000
1.06.01.2.05.0002	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	20 paket	12.000.000	APBD Kab. Jombang		20 paket	12.000.000
1.06.01.2.06	Kegiatan : administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	5.597.950	APBD Kab. Jombang		8 paket	5.602.000
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	12.799.300	APBD Kab. Jombang		10 paket	17.395.950
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	1.525.200	APBD Kab. Jombang		5 paket	1.950.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	104.996.000	APBD Kab. Jombang		2 paket	104.654.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	10.988.350	APBD Kab. Jombang		5 paket	10.871.200

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun (tahun rencana)/ 2026			Catatan	Prakiraan Maju (2027)	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	5.556.000	APBD Kab. Jombang		12 dokumen	5.556.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	86.490.500	APBD Kab. Jombang		12 laporan	86.490.500
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerapan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	5.597.950	APBD Kab. Jombang		8 paket	5.602.000
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	12.799.300	APBD Kab. Jombang		10 paket	17.395.950
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	1.525.200	APBD Kab. Jombang		5 paket	1.950.000
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	104.996.000	APBD Kab. Jombang		2 paket	104.654.000
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	10.988.350	APBD Kab. Jombang		5 paket	10.871.200
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	5.556.000	APBD Kab. Jombang		12 dokumen	5.556.000
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	86.490.500	APBD Kab. Jombang		12 laporan	86.490.500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun (tahun rencana)/ 2026			Catatan	Prakiraan Maju (2027)	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.06.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung atau bangunan lainnya	8 unit	122.148.700	APBD Kab. Jombang		100%	139.278.000
1.06.01.2.07.0010	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung atau bangunan lainnya	8 unit	122.148.700	APBD Kab. Jombang		12 unit	139.278.000
1.06.01.2.08	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	127.800.000	APBD Kab. Jombang		12 laporan	127.800.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	562.078.500	APBD Kab. Jombang		12 laporan	500.967.000
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	127.800.000	APBD Kab. Jombang		12 laporan	127.800.000
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	562.078.500	APBD Kab. Jombang		12 laporan	500.967.000
1.06.01.2.09	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	41.610.000	APBD Kab. Jombang		1 unit	41.610.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 unit	251.574.971	APBD Kab. Jombang		38 unit	287.510.367

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun (tahun rencana)/ 2026			Catatan	Prakiraan Maju (2027)	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	123.218.244	APBD Kab. Jombang		1 unit	114.407.659
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	38 unit	26.180.000	APBD Kab. Jombang		38 unit	21.610.640
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	41.610.000	APBD Kab. Jombang		1 unit	41.610.000
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 unit	251.574.971	APBD Kab. Jombang		38 unit	287.510.367
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	123.218.244	APBD Kab. Jombang		1 unit	114.407.659
1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	38 unit	26.180.000	APBD Kab. Jombang		38 unit	21.610.640
1.06.02	Program pemberdayaan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berdaya	100,00%	1.220.023.750	APBD Kab. Jombang		100,00%	1.580.514.071

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun (tahun rencana)/ 2026			Catatan	Prakiraan Maju (2027)	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.06.02.2.02	Kegiatan pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten-kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	17 dokumen	15.975.000	APBD Kab. Jombang		17 dokumen	16.247.916
1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	17 dokumen	15.975.000	APBD Kab. Jombang		17 dokumen	16.247.916
1.06.02.2.03	Kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	80 keluarga	40.490.000	APBD Kab. Jombang		80 keluarga	42.918.345
		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	87 lembaga	638.576.000	APBD Kab. Jombang		87 lembaga	825.508.800
		Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	221 orang	235.525.000	APBD Kab. Jombang		230 orang	236.717.500
		Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	375 orang	31.796.950	APBD Kab. Jombang		375 orang	31.796.950

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun (tahun rencana)/ 2026			Catatan	Prakiraan Maju (2027)	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitas dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	35 orang	23.207.500	APBD Kab. Jombang		37 orang	26.017.572
		Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	306 desa/ kelurahan	62.244.450	APBD Kab. Jombang		306 desa/ kelurahan	62.244.450
		Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	70 orang	172.208.850	APBD Kab. Jombang		75 orang	196.735.600
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	80 keluarga	40.490.000	APBD Kab. Jombang		80 keluarga	42.918.345
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	87 lembaga	638.576.000	APBD Kab. Jombang		87 lembaga	825.508.800

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun (tahun rencana)/ 2026			Catatan	Prakiraan Maju (2027)	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.06.02.2.03.0010	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	221 orang	235.525.000	APBD Kab. Jombang		230 orang	236.717.500
1.06.02.2.03.0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	375 orang	31.796.950	APBD Kab. Jombang		375 orang	31.796.950
1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitas dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	36 orang	23.207.500	APBD Kab. Jombang		37 orang	26.017.572
1.06.02.2.03.0013	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	306 desa/ kelurahan	62.244.450	APBD Kab. Jombang		306 desa/ kelurahan	62.244.450

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun (tahun rencana)/ 2026			Catatan	Prakiraan Maju (2027)	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	70 orang	172.208.850	APBD Kab. Jombang		75 orang	196.735.600
1.06.04	Program rehabilitasi sosial	Persentase penerima manfaat yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	1,50%	1.787.142.900	APBD Kab. Jombang		1,60%	2.037.312.833
1.06.04.2.01	Kegiatan : rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	465 orang	1.124.400.000	APBD Kab. Jombang		470 orang	1.153.850.000
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	125 orang	37.500.000	APBD Kab. Jombang		130 orang	41.233.920
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	56.473.900	APBD Kab. Jombang		55 orang	71.390.000
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	79.075.000	APBD Kab. Jombang		100 orang	136.840.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun (tahun rencana)/ 2026			Catatan	Prakiraan Maju (2027)	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	130 orang	145.632.500	APBD Kab. Jombang		130 orang	139.747.500
		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	37.000.000	APBD Kab. Jombang		75 orang	55.807.300
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	25 orang	2.175.000	APBD Kab. Jombang		25 orang	6.750.000
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	8.400.000	APBD Kab. Jombang		100 orang	7.850.000
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	9.385.000	APBD Kab. Jombang		50 orang	10.000.000
		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	6.385.000	APBD Kab. Jombang		50 orang	16.000.000
		Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi					10 orang	60.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun (tahun rencana)/ 2026			Catatan	Prakiraan Maju (2027)	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
		Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	18.284.500	APBD Kab. Jombang		20 orang	18.284.000
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	70 orang	24.500.000	APBD Kab. Jombang		70 orang	24.500.000
		Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	10 orang	19.282.000	APBD Kab. Jombang		10 orang	37.000.000
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	465 orang	1.124.400.000	APBD Kab. Jombang		470 orang	1.153.850.000
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	125 orang	37.500.000	APBD Kab. Jombang		130 orang	41.233.920
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	56.473.900	APBD Kab. Jombang		55 orang	71.390.000
1.06.04.2.01.0004	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	79.075.000	APBD Kab. Jombang		100 orang	136.840.000
1.06.04.2.01.0005	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	130 orang	145.632.500	APBD Kab. Jombang		130 orang	139.747.500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun (tahun rencana)/ 2026			Catatan	Prakiraan Maju (2027)	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.06.04.2.01.0006	pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	37.000.000	APBD Kab. Jombang		75 orang	55807300
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	25 orang	2.175.000	APBD Kab. Jombang		25 orang	6750000
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	8.400.000	APBD Kab. Jombang		100 orang	7850000
1.06.04.2.01.0011	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	9.385.000	APBD Kab. Jombang		50 orang	10.000.000
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	6.385.000	APBD Kab. Jombang		50 orang	16.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun (tahun rencana)/ 2026			Catatan	Prakiraan Maju (2027)	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.06.04.2.01.0015	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi					10 orang	60.000.000
1.06.04.2.01.0016	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	18.284.500	APBD Kab. Jombang		20 orang	18.284.000
1.06.04.2.01.0017	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar PantiKewenangan Kabupaten/Kota	70 orang	24.500.000	APBD Kab. Jombang		70 orang	24.500.000
1.06.04.2.01.0018	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	10 orang	19.282.000	APBD Kab. Jombang		10 orang	37.000.000
1.06.04.2.02	Kegiatan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan napza di luar panti	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota	70 orang	21.000.000	APBD Kab. Jombang		70 orang	29.058.313

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun (tahun rencana)/ 2026			Catatan	Prakiraan Maju (2027)	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
		Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan diluar panti kewenangan Kabupaten/Kota	70 orang	24.500.000	APBD Kab. Jombang		75 orang	26.250.000
		Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	270 orang	137.375.000	APBD Kab. Jombang		280 orang	177.978.600
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	12.170.000	APBD Kab. Jombang		55 orang	13.772.700
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	50 orang	17.220.000	APBD Kab. Jombang		50 orang	11.000.000
		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	6.385.000	APBD Kab. Jombang		50 orang	10.000.000
1.06.04.2.03.0004	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota	70 orang	21.000.000	APBD Kab. Jombang		70 orang	29.058.313
1.06.04.2.02.0006	Penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan diluar panti kewenangan Kabupaten/Kota	70 orang	24.500.000	APBD Kab. Jombang		75 orang	26.250.000
1.06.04.2.02.0007	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	270 orang	137.375.000	APBD Kab. Jombang		280 orang	177.978.600
1.06.04.2.02.0011	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	12.170.000	APBD Kab. Jombang		55 orang	13.772.700

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun (tahun rencana)/ 2026			Catatan	Prakiraan Maju (2027)	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.06.04.2.02.0012	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	50 orang	17.220.000	APBD Kab. Jombang		50 orang	11.000.000
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	6.385.000	APBD Kab. Jombang		50 orang	10.000.000
1.06.05	Program perlindungan dan Jaminan sosial	Persentase penerima bantuan sosial yang mendapatkan akses layanan dasar dan bantuan usaha	95,67 persen	16.226.984.238	APBD Kab. Jombang		95,67 persen	16.196.513.388
1.06.05.2.02	Kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten-kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	105.544 orang	78.746.250	APBD Kab. Jombang		105.544 orang	273.966.000
		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	140 orang	144525000	APBD Kab. Jombang		140 orang	294.831.550
		Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	17.713 orang	15986248488	APBD Kab. Jombang, DBHCHT		17.713 orang	15.605.131.338
		Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikanyang dilaksanakan	1705 usulan	17464500	APBD Kab. Jombang		1705 usulan	22.584.500
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	105.544 orang	78.746.250	APBD Kab. Jombang		105.544 orang	273.966.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun (tahun rencana)/ 2026			Catatan	Prakiraan Maju (2027)	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	140 orang	144.525.000	APBD Kab. Jombang		140 orang	294.831.550
1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	17.713 orang	15.986.248.488	APBD Kab. Jombang, DBHCHT		17.713 orang	15.605.131.338
1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	1705 usulan	17.464.500	APBD Kab. Jombang		1705 usulan	22.584.500
1.06.06	Program bencana	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	520.587.360	APBD Kab. Jombang		100%	605.788.325
		Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	32,7%				49%	
		Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	100%				100%	
1.06.06.2.01	Kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/ kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	7900 orang	247.590.760	APBD Kab. Jombang		7900 orang	298.285.200
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana	200 orang	33.984.000	APBD Kab. Jombang		200 orang	33.984.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun (tahun rencana)/ 2026			Catatan	Prakiraan Maju (2027)	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
		Kewenangan Kabupaten/Kota						
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang	12.160.000	APBD Kab. Jombang		200 orang	14.904.000
		Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang	12.160.000	APBD Kab. Jombang		200 orang	9.936.000
		Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 unit	9.816.300	APBD Kab. Jombang		1 unit	22.210.000
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	7900 orang	247.590.760	APBD Kab. Jombang		7900 orang	298.285.200
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang	33.984.000	APBD Kab. Jombang		200 orang	33.984.000
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang	12.160.000	APBD Kab. Jombang		200 orang	14.904.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun (tahun rencana)/ 2026			Catatan	Prakiraan Maju (2027)	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang	12.160.000	APBD Kab. Jombang		200 orang	9.936.000
1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 unit	9.816.300	APBD Kab. Jombang		1 unit	22.210.000
1.06.06.2.02	Kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/ kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 kampung	34.456.300	APBD Kab. Jombang		50 kampung	36.346.625
		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	135.420.000	APBD Kab. Jombang		40 orang	143.960.000
		Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	300 orang	35.000.000	APBD Kab. Jombang		300 orang	46.162.500
1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 kampung	34.456.300	APBD Kab. Jombang		50 kampung	36.346.625
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	135.420.000	APBD Kab. Jombang		40 orang	143.960.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun (tahun rencana)/ 2026			Catatan	Prakiraan Maju (2027)	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
Sosialisasi dan Edukasi	1.06.06.2.02.0008 penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	300 orang	35.000.000	APBD Kab. Jombang		300 orang	46.162.500
1.06.07	Program pengelolaan taman makam pahlawan	Persentase taman makam pahlawan (TMP) yang terkelola dengan baik	95%	66.550.350	APBD Kab. Jombang		95%	115.522.700
1.06.07.2.01	Kegiatan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/ kota	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan	1 dokumen	52.200.000	APBD Kab. Jombang		1 dokumen	99.663.700
		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 makam	14.350.350	APBD Kab. Jombang		1 makam	15.663.700
1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabuoaten/kota	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan	1 dokumen	52.200.000	APBD Kab. Jombang		1 dokumen	99.663.700
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 makam	14.350.350	APBD Kab. Jombang		1 makam	15.663.700
J U M L A H				25.250.452.695				25.949.605.571

*Program Pembangunan Mendukung Pengarusutamaan Gender Dinas Sosial
Kab. Jombang Tahun 2026*

Kode	Program	Kode	Kegiatan
1.06.01	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1.06.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
1.06.02	Pemberdayaan sosial	1.06.02.2.02	Pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota
		1.06.02.2.03	Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial
1.06.04	Rehabilitasi sosial	1.06.04.2.01	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial
		1.06.04.2.02	Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan napza di luar panti sosial
1.06.05	Perlindungan dan jaminan sosial	1.06.05.2.02	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota
1.06.06	Penanganan bencana	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota

Sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting khususnya pada pilar 1 dan 3 dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting terkait integrasi perencanaan dan penganggaran di daerah serta peningkatan dukungan anggaran percepatan penurunan stunting pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota telah disusun hasil pemetaan program dan kegiatan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan

inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, dan telah diubah dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Berikut adalah program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

Program dan Kegiatan Mendukung Percepatan Penurunan Stunting Urusan Sosial

Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021				Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023				
Indikator	Target	Tahun	Definisi Operasional	Kode	Nomenklatur urusan kabupaten/ kota	Kinerja	Indikator	Satuan
Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	10 juta jiwa	2024	Jumlah jiwa warga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Terpenuhinya keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/ kota	keluarga
Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan	15.600.039 jiwa		Jumlah jiwa warga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Terpenuhinya keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/ kota	keluarga
Jumlah pendamping program keluarga harapan (PKH) yang terlatih modul Kesehatan dan gizi	100% pendamping	2024	Jumlah pendamping program keluarga harapan (PKH) yang telah terlatih modul Kesehatan dan gizi	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial Masyarakat kewenangan kabupaten/ kota	Meningkatnya kemampuan potensi pekerja sosial Masyarakat kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah orang mendapatkan peningkatan kapasitas pekerja sosial Masyarakat kewenangan kabupaten/ kota	orang
Pasangan usia subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat	90		Cakupan PUS dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan bersyarat terhadap jumlah PUS dengan status	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Terpenuhinya keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/ kota	keluarga

Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021				Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023				
Indikator	Target	Tahun	Definisi Operasional	Kode	Nomenklatur urusan kabupaten/ kota	Kinerja	Indikator	Satuan
Pasangan usia subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan non tunai	90		miskin	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Terpenuhinya keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/ kota	keluarga
Cakupan pasangan usia subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi penerima bantuan iuran (PBI) jaminan Kesehatan terhadap PUS dengan status miskin	90		Cakupan pasangan usia subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi penerima bantuan iuran (PBI) jaminan Kesehatan terhadap PUS dengan status miskin	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Terpenuhinya keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/ kota	keluarga
Kelompok keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga haraan (PKH) yang mengikuti pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) dengan modul Kesehatan dan gizi	90		Persentase Kelompok keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga haraan (PKH) yang mengikuti pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) dengan modul Kesehatan dan gizi	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Terpenuhinya keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/ kota	keluarga
Keluarga penerima manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur			Persentase Keluarga penerima manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Terpenuhinya keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/ kota	keluarga

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3407 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka rencana kerja Dinas Sosial tahun 2026 melakukan penyesuaian, sehingga mempunyai enam (6) program, lima belas (15) kegiatan dan lima puluh tiga (63) sub kegiatan. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi pada Dinas Sosial Kabupaten Jombang, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial
Tahun 2026

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sumber Dana	Pagu Indikatif
	Program: penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kab Jombang	Nilai evaluasi AKIP perangkat daerah	78,55 nilai	APBD Kab Jombang	5.429.164.097
	Kegiatan : Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab Jombang	Jumlah data statistik sektoral daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah	107 data	APBD Kab Jombang	4.850.000
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan		3.990.000
			Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen		9.750.000
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab Jombang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	APBD Kab Jombang	4.850.000
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Kab Jombang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	APBD Kab Jombang	3.990.000
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah data statistik sektoral daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah	107 data	APBD Kab Jombang	9.750.000
	Kegiatan administrasi keuangan	Kab	Jumlah laporan keuangan	17 laporan	APBD Kab	3.916.010.382

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sumber Dana	Pagu Indikatif
	perangkat daerah	Jombang	bulanan/ tribulanan/ semester SKPD yang disusun		Jombang	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/ bulan		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan		
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab Jombang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 orang/ bulan	APBD Kab Jombang	3.736.606.432
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	APBD Kab Jombang	166.290.000
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab Jombang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	APBD Kab Jombang	3.235.350
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ tribulanan/ semester SKPD	Kab Jombang	Jumlah laporan keuangan bulanan/ tribulanan/ semester SKPD yang disusun	17 laporan	APBD Kab Jombang	9.878.600
	Kegiatan : Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab Jombang	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	20 paket	APBD Kab Jombang	12.000.000
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab Jombang	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	20 paket	APBD Kab Jombang	12.000.000
	Kegiatan : administrasi umum perangkat daerah	Kab Jombang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	8 paket	APBD Kab Jombang	5.597.950

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sumber Dana	Pagu Indikatif
			Kantor yang Disediakan			
			Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket		12.799.300
			Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket		1.525.200
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 paket		104.996.000
			Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 paket		10.988.350
			Jumlah dokumen bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen		5.556.000
			Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan		86.490.500
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerapan bangunan kantor	Kab Jombang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	APBD Kab Jombang	5.597.950
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab Jombang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	APBD Kab Jombang	12.799.300
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab Jombang	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	APBD Kab Jombang	1.525.200
	Penyediaan bahan logistic kantor	Kab Jombang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 paket	APBD Kab Jombang	104.996.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab Jombang	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 paket	APBD Kab Jombang	10.988.350

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sumber Dana	Pagu Indikatif
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab Jombang	Jumlah dokumen bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	APBD Kab Jombang	5.556.000
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab Jombang	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	APBD Kab Jombang	86.490.500
	Kegiatan : pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Jombang	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	8 unit	APBD Kab. Jombang	122.148.700
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Jombang	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	8 unit	APBD Kab. Jombang	122.148.700
	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab Jombang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	APBD Kab Jombang	127.800.000
			Jumla laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan		562.078.500
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab Jombang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	APBD Kab Jombang	127.800.000
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Jombang	Jumla laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	APBD Kab Jombang	562.078.500
	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab Jombang	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	APBD Kab Jombang	41.610.000

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sumber Dana	Pagu Indikatif
			Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya	36 unit		251.574.971
			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit		123.218.244
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	38 unit		26.180.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab Jombang	Jumlah kendaaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	APBD Kab Jombang	41.610.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab Jombang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya	36 unit	APBD Kab Jombang	251.574.971
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Jombang	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	APBD Kab Jombang	123.218.244
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan	Kab Jombang	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	38 unit	APBD Kab Jombang	26.180.000
	Program pemberdayaan sosial	Kab Jombang	Persentase potensi sumber kesejahteraan ssoial yang meningkat kapasitasnya dalam pemberdayaan sosial	100 persen	APBD Kab Jombang	1.204.048.750

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sumber Dana	Pagu Indikatif
	Kegiatan pengumpulan sumbangan dalamdaerah kabupaten/kota	Kab Jombang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	17 dokumen	APBD Kab Jombang	15.975.000
	Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	Kab Jombang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	17 dokumen	APBD Kab Jombang	15.975.000
	Kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	Kab Jombang	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/ kota	80 keluarga	APBD Kab Jombang	40.490.000
			Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/ kota	87 lembaga		638.576.000
			Jumlsh warakawuri/keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan, dan janda duda perintis kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	221 orang		235.525.000
			Jumlah orang yang mengikuti dan mendapatkan pengenalan, penanaman, dan penghayatan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial	375 orang		31.796.950
			Jumlah sertifikat yang dari hasil	35 sertifikat		23.207.500

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sumber Dana	Pagu Indikatif
			peningkatan sumber daya manusia dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) kewenangan kabupaten/ kota			
			Jumlah puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hubungan program graduasi	306 desa/kelurahan		62.244.450
			Jumlah penyuluh soisal, penyuluh sisal masyarakat, pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat dan.atau tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang meningkat kapasitasnya	70 orang		172.208.850
	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota	Kab Jombang	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/ kota	80 keluarga	APBD Kab Jombang	40.490.000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten-Kota	Kab Jombang	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/ kota	87 lembaga	APBD Kab Jombang	638.576.000
	Fasilitasi pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi warakawuri/keluarga pahlawan nasional, keperintisan kemerdekaan, dan janda duda perintiss kemerdekaan	Kab. Jombang	Jumlsh warakawuri/keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan, dan janda duda perintis kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	221 orang	APBD Kab Jombang	235.525.000
	Pengenalan, penanaman dan penghayatan nilai-nilai	Kab. Jombang	Jumlah orang yang mengikuti dan mendapatkan pengenalan,	375 orang	APBD Kab Jombang	31.796.950

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sumber Dana	Pagu Indikatif
	kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial		penanaman, dan penghayatan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial			
	Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	Kab Jombang	Jumlah sertifikat yang dari hasil peningkatan sumber daya manusia dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) kewenangan kabupaten/ kota	35 orang	APBD Kab Jombang	23.207.500
	Fasilitasi pengembangan pusat kesejahteraan sosial (puskesmas) kewenangan kabupaten/kota	Kab Jombang	Jumlah puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hubungan program graduasi	306 desa/kelurahan		62.244.450
	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan kewenangan kabupaten/kota	Kab Jombang	Jumlah penyuluh sosial, penyuluh sosial masyarakat, pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat dan.atau tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang meningkat kapasitasnya	70 orang		172.208.850
	Program Rehabilitasi sosial	Kab Jombang	Persentase penerima manfaat yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	1,5 persen	APBD Kab Jombang	1.787.142.900
	Kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Kab Jombang	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permaknaan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/ kota	465 orang	APBD Kab Jombang	1.124.400.000
			Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan kabupaten/ kota	125 orang		37.500.000

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sumber Dana	Pagu Indikatif
			Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/ kota	50 orang		56.473.900
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/ kota	100 orang		79.075.000
			Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota	130 orang		145.632.500
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	75 orang		37.000.000
			Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota	25 orang		2.175.000
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota	100 orang		8.400.000
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	50 orang		9.385.000
			Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan	50 orang		6.385.000

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sumber Dana	Pagu Indikatif
			kabupaten/kota			
			Jumlah orang yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial bagi anak berhadapan dengan hukum (ABH) kewenangan kabupaten/ kota	20 orang		18.284.500
			Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan Kesehatan di luar panti kewenangan kabupaten/ kota	70 orang		24.500.000
			Jumlah oang yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui asistensi rehabilitasi sosial	10 orang		19.282.000
	Penyediaan permakanan	Kab Jombang	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakaan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/ kota	465 orang	APBD Kab Jombang	1.124.400.000
	Penyediaan sandang	Kab Jombang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan kabupaten/ kota	125 orang	APBD Kab Jombang	37.500.000
	Penyediaan Alat Bantu	Kab Jombang	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/ kota	50 orang	APBD Kab Jombang	56.473.900
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Kab Jombang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	100 orang	APBD Kab Jombang	79.075.000

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sumber Dana	Pagu Indikatif
			kewenangan kabupaten/ kota			
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Kab Jombang	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota	130 orang	APBD Kab Jombang	145.632.500
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab Jombang	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	75 orang	APBD Kab Jombang	37.000.000
	Pemberian akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	Kab Jombang	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota	25 orang		2.175.000
	Pemberian layanan kedaruratan	Kab Jombang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota	100 orang		8.400.000
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab Jombang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	50 orang	APBD Kab Jombang	9.385.000
	Pemberian layanan rujukan	Kab Jombang	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	50 orang		6.385.000
	Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial bagi anak berhadapan dengan hukum (ABH)	Kab Jombang	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial bagi anak berhadapan dengan hukum (ABH) kewenangan kabupaten/ kota	20 orang		18.284.500

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sumber Dana	Pagu Indikatif
	Penyediaan perbekalan kesehatan	Kab Jombang	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan Kesehatan di luar panti kewenangan kabupaten/ kota	70 orang		24.500.000
	Pelaksanaan rehabiitasi sosial melalui asistensi rehabilitasi sosial	Kab Jombang	Jumlah oang yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui asistensi rehabilitasi sosial	10 orang		19.282.000
	Kegiatan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraa sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/ AIDS dan napza di luar panti	Kab Jombang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	70 orang	APBD Kab Jombang	21.000.000
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	70 orang	APBD Kab Jombang	24.500.000
			Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota	270 orang	APBD Kab Jombang	137.375.000
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	50 orang	APBD Kab Jombang	12.170.000
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/ kota	50 orang	APBD Kab Jombang	17.220.000
			Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	50 orang	APBD Kab Jombang	6.385.000

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sumber Dana	Pagu Indikatif
	Penyediaan sandang	Kab Jombang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	70 orang	APBD Kab Jombang	21.000.000
	Penyediaan perbekalan Kesehatan di luar panti	Kab Jombang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/ Kota	70 orang	APBD Kab Jombang	24.500.000
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Kab Jombang	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota	270 orang	APBD Kab Jombang	137.375.000
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Kab Jombang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	50 orang	APBD Kab Jombang	12.170.000
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Kab Jombang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/ kota	50 orang	APBD Kab Jombang	17.220.000
			Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	50 orang	APBD Kab Jombang	6.385.000
	Program perlindungan dan jaminan sosial	Kab Jombang	Persentase penerima bantuan sosial yang mendapatkan akses layanan dasar dan bantuan usaha	95,67 persen	APBD Kab Jombang	16.226.984.238
	Kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Kab Jombang	Jumlah fakir miskin cakupan daerah kabupaten/ kota yang didata	105.544 orang	APBD Kab Jombang	78.746.250
			Jumlah usulan penindaklanyakan, usulan yang terverifikasi dan tervalidasi, dan	1705 usulan	APBD Kab Jombang	144.525.000

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sumber Dana	Pagu Indikatif
			usulan perbaikan yang dilaksanakan			
			Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial	17.713 orang	APBD Kab Jombang	15.986.248.488
			Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/ kota	140 orang	APBD Kab Jombang	17.464.500
	Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Kab Jombang	Jumlah fakir miskin cakupan daerah kabupaten/ kota yang didata	105.544 orang	APBD Kab Jombang	78.746.250
	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Kab Jombang	Jumlah usulan penindaklanyakan, usulan yang terverifikasi dan tervalidasi, dan usulan perbaikan yang dilaksanakan	1705 usulan	APBD Kab Jombang	144.525.000
	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Kab Jombang	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial	17.713 orang	APBD Kab Jombang	15.986.248.488
	Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Kab Jombang	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/ kota	140 orang	APBD Kab Jombang	17.464.500
	Program bencana	Kab Jombang	Persentase korban bencana alam, sosial dan.atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100 %	APBD Kab Jombang	520.587.360
			Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat	32,7%		

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sumber Dana	Pagu Indikatif
			kesiapsiaaannya			
			Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	100%		
	Kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/ kota	Kab Jombang	Jumlah orang yang mendapatkan permakanaan 3 x 1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	7900 orang	APBD Kab Jombang	247.590.700
			Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapannya lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan kabupaten/ kota	200 orang	APBD Kab Jombang	33.984.000
			Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/ kota	1 unit	APBD Kab Jombang	12.160.000
			Jumlah Orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan kabupaten/kota	200 orang	APBD Kab Jombang	12.160.000
			Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan kabupaten/kota	200 orang	APBD Kab Jombang	9.816.300
	Penyediaan makanan	Kab Jombang	Jumlah orang yang mendapatkan permakanaan 3 x 1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	7900 orang	APBD Kab Jombang	247.590.700

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sumber Dana	Pagu Indikatif
	Penyediaa sandang	Kab Jombang	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapannya lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan kabupaten/ kota	200 orang	APBD Kab Jombang	33.984.000
	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Kab Jombang	Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/ kota	1 unit	APBD Kab Jombang	12.160.000
	Penanganan khusus kelompok rentan	Kab Jombang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/ Kota	200 orang	APBD Kab Jombang	12.160.000
	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Kab Jombang	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan kabupaten/ kota	200 orang	APBD Kab Jombang	9.816.300
	Kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/ kota	Kab Jombang	Jumlah kampung yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kabupaten/ kota	50 kampung	APBD Kab Jombang	34.456.300
			Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kabupaten / kota	40 orang	APBD Kab Jombang	135.420.000
			Jumlah aak usia sekolah yang mendapatkan edukasi penanggulangan bencana pada	300 orang	APBD Kab Jombang	35.000.000

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sumber Dana	Pagu Indikatif
			Lokasi rawan bencana			
	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana	Kab Jombang	Jumlah kampung yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kabupaten/ kota	50 kampung	APBD Kab Jombang	34.456.300
	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Kab Jombang	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kabupaten / kota	40 orang	APBD Kab Jombang	135.420.000
	Sosialisasi dan edukasi penanggulangan bencana pada anak usia sekolah		Jumlah aak usia sekolah yang mendapatkan edukasi penanggulangan bencana pada Lokasi rawan bencana	300 orang		35.000.000
	Program pengelolaan taman makam pahlawan	Kab Jombang	Persentase taman makam pahlawan (TMP) yang terkelola dengan baik	95 %	APBD Kab Jombang	66.550.350
	Kegiatan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/ kota	Kab Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana danPrasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 dokumen	APBD Kab Jombang	52.200.000
			Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada taman makam pahlawan kabupaten/ kota	1 makam		14.350.350
	Rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Kab Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana danPrasarana Taman	1 dokumen	APBD Kab Jombang	52.200.000

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sumber Dana	Pagu Indikatif
			Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			
	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Kab Jombang	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada taman makam pahlawan kabupaten/kota	1 makam	APBD Kab Jombang	14.350.350
J U M L A H						25.250.452.695

BAB V P E N U T U P

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Jombang tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan harus sebagai acuan untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2026 di lingkup Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Selain itu Renja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi Perangkat Daerah yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan jangka pendek.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jombang tahun anggaran 2026, penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dimaksud didasarkan atas prioritas pembangunan sebagai bentuk penjabaran visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Jombang akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu juga renja SKPD sebagai acuan dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan di dalam Renja Dinas Sosial Kabupaten Jombang tahun 2026 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan profesional. Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efesiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Renja Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun 2026 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat, dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
3. Renja Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN.
4. Renja Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun 2026, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diikuti dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijaksanaannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
2. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasata dalam kegiatan pembangunan.
4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
5. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
6. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih insentif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.
7. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
8. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang ditetapkan.

Jombang, 12 Agustus 2025
**KEPALA DINAS SOSIAL
 KABUPATEN JOMBANG**




HARI PURNOMO, AP, M.E
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19751110 199501 1 002